



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN
TAHUN 2017-2021



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

**STRATEGI SANITASI KABUPATEN
TAHUN 2017 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung *Sustainable Development Goals* (SDG's) yakni mencapai akses air minum layak dan sanitasi dasar bagi seluruh penduduk Indonesia di tahun 2030, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah mencanangkan gerakan 100 persen akses air minum dan sanitasi (*universal access*) pada tahun 2019 sebagai salah satu sasaran pokok pembangunan nasional bidang ekonomi (*infrastruktur dasar*) dan menjadi rujukan arah kebijakan pembangunan sanitasi secara nasional, dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, sejak tahun 2010 hingga saat ini telah dilakukan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
- b. bahwa berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 845/9288/SJ tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015-2019 di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2017-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2009 Nomor 1);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN TAHUN 2017-2021

Pasal I

Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



ADRY A. MANENGKEY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2017 NOMOR 41

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pemutakhiran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah dapat diselesaikan oleh Kelompok Kerja Sanitasi sesuai jadwal yang direncanakan untuk pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pemutakhiran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi, dan tindakan yang tepat untuk menuntaskan masalah sanitasi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pemutakhiran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam penentuan rencana anggaran serta program dan kegiatan yang direncanakan 5 (lima) tahun kedepan telah disepakati oleh Perangkat Daerah yang secara langsung menangani pembangunan sektor sanitasi, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

Kami menyadari bahwa Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pemutakhiran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan perbaikan dari berbagai pihak, terutama yang telah berpengalaman dalam pembangunan bidang sanitasi sangat kami harapkan, untuk kesempurnaan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pemutakhiran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini.

Atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak dalam penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pemutakhiran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini, kami ucapkan terima kasih dengan harapan semoga tersusunnya dokumen ini bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ondong Siau, 21 November 2017

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



TONI SUPIT, SE, MM

Ringkasan Eksekutif

1. Profil Sanitasi Saat Ini

No	Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik
A. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana	
1	Masih ada masyarakat yang BABs sebesar 4,95 % (906 KK)
2	Sebanyak 68,72% atau setara dengan 12.681 KK masih menggunakan Cubluk/jamban/Tangki Septik yang tidak aman
3	Belum ada Truck Tinja dan IPLT
B. Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi.	
1	Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang perlunya memiliki tanksi septik yang aman.
2	Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih rendah.
3	Belum ada kelembagaan pengelolaan air limbah, serta pengelolaan air limbah di daerah hanya berada dilevel eselon IV.
4	Minimnya alokasi anggaran APBD untuk Pengelolaan Air Limbah
5	Belum memiliki perencanaan pengelolaan air limbah (Masterplan Air Limbah)
6	Belum ada peraturan tentang pengelolaan air limbah.
7	Tidak berfungsinya lembaga masyarakat yang dibentuk untuk mengolah air limbah skala komunal (KSM IPAL Komunal)

No	Permasalahan Mendesak Persampahan
A. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana	
1	Sebagian besar sampah tidak terolah sebanyak 90,20%
2	Belum ada pengolahan sampah lewat pemilahan di TPS 3R, TPST maupun bank sampah
3	Belum ada TPA yang Representatif masing-masing di daratan pulau Siau-Tagulandang-Biaro
B. Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi.	
1	Minimnya anggaran APBD untuk Pengelolaan Persampahan
2	Rendahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan persampahan
3	Belum tersedianya peraturan dan penegakan hukum berkaitan pengelolaan persampahan
4	SDM pengelolaan sampah masih sangat terbatas
5	Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator
6	Masih ada perilaku buang sampah di sungai, danau, laut dan lahan kosong dan membakar sampah.
7	Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta

No	Permasalahan Mendesak Drainase
A. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana	
1	Masih ada area genangan sebesar 22 Ha.
2	Belum ada pengembangan drainase berwawasan lingkungan
B. Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/ Swasta, serta Komunikasi	
1	Rendahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan drainase lingkungan
2	Minimnya anggaran APBD untuk pembangunan Drainase Lingkungan
3	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Drainase, terkait tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat.
4	Belum ada Master plan drainase
5	Belum tersedianya regulasi berkaitan pengelolaan sistem Drainase

2. Kerangka Pengembangan Sanitasi

Komponen	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Air Limbah Domestik						
- Akses Layak	26,37%	28,00%	29,80%	39,80%	49,80%	59,90%
- Akses Dasar	68,72%	68,50%	68,20%	59,20%	49,20%	40,10%
Persampahan						
- Akses Layak	9,81%	16,81%	24,32%	35,32%	46,32%	57,28%
- Akses Dasar	0,00%	5,00%	10,00%	20,00%	31,00%	42,72%
Drainase Perkotaan						
- Luas Genangan	24 Ha	24 Ha	21 Ha	15 Ha	8 Ha	0 Ha

3. Strategi Pengembangan Sanitasi

Air Limbah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mencapai layanan akses sanitasi bidang air limbah menjadi 100% pada tahun 2021.	Mengatasi BABs dari 4,95% (906 KK) menjadi 0% di tahun 2021	Mengatasi BABs dengan mengoptimalkan pemucuan STBM.
	Tersedianya SPALD-Setempat bagi 38.65% Penduduk Kabupaten Sitiro di Tahun 2021	Menyiapkan peraturan tentang pengelolaan air limbah dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik.
		Meningkatkan akses infrastruktur air limbah masyarakat ke sistem yang layak dengan memaksimalkan pembiayaan bersama APBD dan APBN.
	Tersedianya SPALD-Terpusat bagi 21.25% Penduduk Kabupaten Sitiro di Tahun 2021	'Meningkatkan alokasi pendanaan dari APBD untuk pengelolaan air limbah, untuk pembangunan fisik dan advokasi/sosialisasi dalam menggalang kelibatan swasta/masyarakat untuk pembangunan sanitasi.
		Mengoptimalkan lembaga pengelolaan air limbah di kabupaten, untuk dapat memaksimalkan fungsi kelembagaan di tingkat masyarakat.
		Meningkatkan SDM pengelola air limbah lebih baik, sehingga dapat meningkatkan/memicu peran serta masyarakat, dan mencari peluang untuk melibatkan pihak swasta.

Sampah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mencapai layanan akses sanitasi bidang persampahan menjadi 100% atau minimal pencapaian SPM (Persampahan) pada tahun 2021 dengan menyediakan sistem pengolahan sarana dan prasarana persampahan yang memadai	Meningkatkannya akses sampah terangkut ke TPA sebesar 52.9% pada tahun 2021.	Meningkatkan fasilitas pengolahan sampah sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan mulai dari sumbernya, pengangkutan dan pengolahan akhir.
		Mengatur kelembagaan pengelolaan persampahan dan memaksimalkan koordinasi antar instansi pengelola persampahan.
	Tereduksinya sampah dari sumbernya menjadi 4.39% pada tahun 2021.	Menyiapkan regulasi terkait pengelolaan persampahan untuk dapat memaksimalkan pengelolaan persampahan ditingkat masyarakat.
		Menggal potensi pendanaan swasta untuk mengantisipasi keterbatasan penganggaran dari APBD.
		Meningkatkan SDM pengelola persampahan untuk dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai peraturan.

Drainase

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mencapai layanan akses sanitasi bidang drainase mencapai 100% penanganan genangan pada tahun 2021 dengan menyediakan sistem pengolahan sarana dan prasarana drainase yang memadai.	Mengilangkan daerah genangan di Kab.Kepl.Siau Tagulandang Biaro pada tahun 2021.	Memaksimalkan pendanaan APBN untuk mengatasi genangan di kawasan permukiman.
		Mengupayakan pembuatan perencanaan drainase untuk meraih pendanaan APBN.
		Penyediaan regulasi berkaitan dengan pengelolaan drainase.
		Meningkatkan koordinasi antar instansi pengelola drainase dalam pencapaian NSPM Drainase.
		Memanfaatkan peluang pendanaan diluar APBD Kabupaten dalam rangka mengatasi keterbatasan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten.
		Meningkatkan SDM pengelolaan drainase dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan drainase lingkungan.

4. Ringkasan Program dan Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN
AIR LIMBAH DOMESTIK
A. PERENCANAAN UMUM
A.1 Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
B. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK - SETEMPAT
B.1 Pembangunan SPALD-S Skala Komunal maksimal 10 SR (Berbasis Masyarakat)
B.2 IPLT
C. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK - TERPUSAT
C.1 SPALD-T Skala Permukiman (100 SR) - berbasis masyarakat
D. PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN DAERAH
D.1 Penyusunan Perda Sistem Pengelolaan Air Limbah
D.2 Pembentukan Lembaga Pengelola Pengelolaan Air Limbah
D.5 Pembentukan Lembaga Pengelolaan UPTD Air Limbah
E. PEMANTAUAN
E.1 Pemantauan Kualitas Lingkungan (Air Sungai dan Air Sumur)
E.2 Pemanatauan kualitas lingkungan SPALD-T Permukiman
F. PEMASARAN SANITASI
F.1 Workshop Akses Sumber Pendanaan Sanitasi dari sumber Non-Pemerintah
F.2 Koordinasi Pemerintah Kab./Kota, Masyarakat dan Sumber Pendanaan Non-Pemerintah untuk pendanaan Sanitasi
F.3 Pembentukan Lembaga Peduli Sanitasi ditingkat Kab./Kota
F.4 Lomba Sanitasi Lingkungan ditingkat Kab./Kota
PERSAMPAHAN
A. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
A.1 Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten
B. PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA
B.1 Kendaraan Pengangkut Sampah
C. PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA
C.1 Pembangunan TPS 3R - Berbasis Kelembagaan
C.2 Pembangunan TPS Biasa
C.3 Alat Angkut
D. TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)
D.1 Rehabilitasi/Peningkatan TPA
DRAINASE
A. PERENCANAAN UMUM
A.1 Penyusunan Master Plan Sistem Drainase
B. SALURAN DRAINASE TERSIER
B.1 Pembangunan Drainase Lingkungan

5. Ringkasan Kebutuhan Biaya

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Air Limbah Domestik	3,546	3,630	7,095	12,001	7,603	33,874
2	Persampahan	0	1,520	5,555	6,807	7,259	21,141
3	Drainase	1,650	200	500	200	200	2,750
Jumlah (a)		5,196	5,350	13,150	19,008	15,062	57,765
Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi (b)		3,808	3,962	4,123	4,291	4,465	20,649
Perkiraan Komitmen Pendanaan sanitasi (c)		6,445	6,707	6,979	7,263	7,558	34,952
Gap 1 (a - b)		1,388	1,387	9,026	14,717	10,597	37,116
Gap 2 (a - c)		(1,250)	(1,358)	6,170	11,745	7,504	22,812

No.	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2017	2018	2019	2020	2021	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kota	1,696	1,766	4,742	6,036	4,598	18,837
2	APBD Provinsi	0	0	0	0	500	500
3	APBN	3,500	3,500	7,400	11,470	7,200	33,070
Jumlah A		5,196	5,266	12,142	17,506	12,298	52,407
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	0	0	0	0	0	0
2	Masyarakat	0	84	208	302	404	998
Jumlah B		0	84	208	302	404	998
Total (A + B)		5,196	5,350	12,350	17,808	12,702	53,405
Funding Gap (C)		0	0	800	1200	2360	4360
TOTAL		5,196	5,350	13,150	19,008	15,062	57,765

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	I.1
1.1. LATAR BELAKANG	I.1
1.2. METODOLOGI PENYUSUNAN	I.4
1.3. DASAR HUKUM	I.6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	I.9
BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI	II.1
2.1. GAMBARAN WILAYAH.....	II.1
2.2. KEMAJUAN PELAKSANAAN SSK.....	II.16
2.3. PROFIL SANITASI SAAT INI.....	II.18
2.4. AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN MENDESAK SANITASI.....	II.46
BAB 3 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	III.1
3.1. VISI DAN MISI SANITASI.....	III.1
3.2. PENTAHAPAN PENGEMBANGAN SANITASI.....	III.3
3.2.1 Tahapan pengembangan sanitasi.....	III.3
3.2.2 Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi	III.10
3.2.3 Skenario pencapaian sasaran	III.12
3.3. KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH	III.13
BAB 4 STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI	IV.1
4.1. AIR LIMBAH DOMESTIK	IV.1
4.2. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	IV.2
4.3. DRAINASE PERKOTAAN.....	IV.4
BAB 5 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI	V.1
5.1. RINGKASAN.....	V.1
5.2. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH	V.2
5.3. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH...V.4	
5.4. ANTISIPASI FUNDING GAP.....	V.5
BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	VI
LAMPIRAN .	
LAMPIRAN 1: KEUANGAN DAERAH DAN LEMBAR KERJA AREA BERISIKO	
LAMPIRAN 1.1: KEUANGAN DAERAH	
LAMPIRAN 1.2: LEMBAR KERJA ANALISIS AREA BERISIKO MENGGUNAKAN INSTRUMEN PROFIL SANITASI	
LAMPIRAN 2: HASIL ANALISIS SWOT	
LAMPIRAN 3: TABEL KERANGKA KERJA LOGIS	
LAMPIRAN 4: HASIL PEMBAHASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN	

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Isu Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia tertuang dalam target ke-10 dari tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals). Target ke-10 yang merupakan bagian dari tujuan (goal) ke-7 MDG's berbunyi "*Menurunkan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015*". Hal dimaksud telah dicantumkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pelayanan yang mengacu pada SPM tersebut antara lain : sumber daya air, air minum, penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan) dan penanganan permukiman kumuh perkotaan.

Pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi dan air minum di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selama ini sudah berjalan cukup baik, namun pelaksanaannya masih belum terkoordinir dengan baik dan masih dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja yang berhubungan dengan kegiatan ini, begitu juga peran serta dari masyarakat dirasakan masih kurang.

Rendahnya kepedulian masyarakat dan keterlibatan Pemerintah dalam menyingkapi penyehatan lingkungan guna mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Keadaan ini tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang menggunakan air untuk keperluan rumah tangga tidak memenuhi syarat kesehatan. Keadaan ini diperparah lagi oleh

kegiatan kurangnya akses air layak minum bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air, yang menjadikan air hujan sebagai konsumsi sehari-hari baik untuk di konsumsi maupun untuk kegiatan MCK di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan perlu ditingkatkan. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat yang tercermin dari perilaku masyarakat saat ini akan menjawab tantangan pembangunan sanitasi dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 yaitu *Universal Access* cakupan akses 100% untuk air minum dan sanitasi dalam rangka pengamanan air minum.

Pentingnya pengelolaan air minum dan sanitasi untuk mencegah terganggunya kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan, mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk berkomitmen ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan membentuk Kelompok Kerja Sanitasi melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 55 tanggal 3 Pebruari Tahun 2016.

Mengingat kota/kabupaten di Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (*multi years*) untuk pencapaian memiliki layanan sanitasi yang layak dan menyeluruh serta terkait dengan capaian target *Universal Access* di tahun 2019, maka Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melakukan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi tahun 2016 – 2019.

Strategi Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota/kabupaten. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi di Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi di Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro.

Gunà menghasilkan strategi sanitasi sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut, yang berupa rencana strategi berjangka menengah (5 tahun) memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat di implementasikan. Kerangka kerja tersebut diharapkan mampu mengatasi

kesenjangan kemampuan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat.

Kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana sanitasi merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro untuk dapat menyusun strategi bagi percepatan pembangunan sektor sanitasi. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mendanai program pembangunan juga merupakan salah satu faktor pendorong dalam menetapkan prioritas pembangunan.

Oleh karenanya strategi sanitasi akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (*annual action plan*) yang berisikan informasi lebih rinci dari berbagai usulan program dan kegiatan pengembangan layanan sanitasi di Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Pada tahun 2012 POKJA PPSP Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro telah menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS) Air Minum dan Kesehatan Lingkungan serta Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Seiring berjalannya waktu dan lajunya perkembangan-pertumbuhan penduduk dan pembangunan pemukiman diperlukan pemutakhiran pada dokumen strategi sanitasi yang telah ada; oleh karena itu pemutakhiran dokumen strategi sanitasi sangat diperlukan sebab berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten.

Adapun Strategi Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro disusun dengan memperhatikan keterkaitan, keselarasan, dan keterpaduan dengan berbagai dokumen antara lain seperti berikut:

1. Memperhatikan RPJPN dan RPJMN yang dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi di Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan.
2. Memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara melalui penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi di Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro.
3. Berpedoman pada RPJMD dan RTRW Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro yang dilakukan dengan: (1) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka menengah daerah; dan (2) penyelarasan kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang.

4. Berpedoman pada Renstra SKPD terkait sanitasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dilakukan dengan penyesuaian kebijakan, strategi dan program pembangunan sanitasi dengan rencana dan strategi SKPD.

1.2. Metodologi Penyusunan

Metode yang digunakan dalam pemutakhiran penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan serta disusun berdasarkan karakteristik daerah, kapasitas kebijakan, melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dan kepentingan berdasarkan kemampuan riil daerah, kesepakatan masyarakat, kepentingan daerah serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan masyarakat secara aktif pada tahap penyusunan merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi serta sebagai upaya melakukan perubahan perilaku masyarakat secara bertahap. Kepedulian masyarakat tidak saja akan melahirkan kesadaran dalam memelihara prasarana dan sarana, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutannya, baik kuantitas maupun kualitasnya serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Metode pemutakhiran penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Menganalisa kondisi sanitasi yang ada saat ini dan permasalahan mendesak yang ada dalam pengelolaan layanan sanitasi yang meliputi: air limbah domestik, persampahan, drainase dan PHBS terkait sanitasi. Penentuan area berisiko sanitasi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD, analisa kuantitatif hasil studi EHRA, dan data sekunder.
- b. Melakukan penilaian terhadap kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk menentukan isu strategis dan kendala, tantangan serta hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.
- c. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan yang akan dituangkan kedalam visi dan misi sanitasi serta merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi dengan tetap mengacu pada RTRW dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro serta dokumen perencanaan lainnya.
- d. Merumuskan strategi sanitasi yang menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi jangka menengah 5 (lima) tahunan dengan menggunakan alat analisis SWOT.

Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Strategi Sanitasi (SSK) Pemutakhiran ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sumber Data

- a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.
- b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat.

Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa kajian terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: *Environmental Health Risk Assesment (EHRA)*, kajian peran serta swasta dalam penyedia layanan sanitasi, kajian kelembagaan dan keuangan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat, dan kajian sanitasi sekolah.

2. Pengumpulan Data

Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain :

- ✓ Kajian Literatur
- ✓ Observasi / wawancara responden
- ✓ Forum Diskusi, lokakarya dan sebagainya

3. Jenis Data

- a. Data primer; yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan Pokja. Data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret/dokumentasi kondisi eksisting di lapangan.
- b. Data sekunder; yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat dalam Pokja Sanitasi.

4. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam Penyusunan SSK Pemutakhiran yaitu:

- a. Diagram Sistem Sanitasi (DSS) digunakan untuk memetakan kondisi eksisting infrastruktur sanitasi (pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan);

- b. Instrumen Profil Sanitasi merupakan alat bantu untuk menganalisis area berisiko berdasarkan tingkat risiko sanitasi serta tipikal sistem sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) per kelurahan/desa berdasarkan input data umum maupun data khusus layanan sanitasi perkomponen di Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro;
- c. SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Metode ini mengkaji kondisi internal dan eksternal suatu organisasi/lembaga/entitas tertentu dari empat aspek yaitu: Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang/Kesempatan), dan Treat (ancaman);
- d. Kerangka Kerja Logis (KKL) menjelaskan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang dihadapi;
- e. Instrumen perencanaan sanitasi merupakan alat bantu untuk menganalisis perkiraan biaya sistem dan teknologi sanitasi yang dipilih berdasarkan input data umum dan biaya maupun data khusus mengenai system seleksi dan pemilihan teknologi setiap zona untuk komponen air limbah domestik, persampahan, dan drainase.

1.3. DASAR HUKUM

Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional/pusat maupun daerah. Strategi Sanitasi (SSK) Kabupaten Kepulauan. Siau Tagulandang Biaro didasarkan pada peraturan dan produk hukum yang meliputi :

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah /Kota.
11. Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Keputusan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014, Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
5. Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu tercapainya Universal Akses Sanitasi pada Tahun 2019.

Keputusan dan Peraturan Menteri Republik Indonesia

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.
3. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata-Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum.
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan.
6. Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman.
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/XI/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil.
11. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan.
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber-Sumber Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank sampah;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;
21. Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017

Peraturan Bupati dan Perda Kabupaten Sitaro

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 6 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro;
3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 55 Tgl 3 Pebruari Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari 6 bab yang meliputi :

Bab 1 Pendahuluan

Berisikan latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum, dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab 2 Profil Sanitasi Saat Ini

Dalam bab ini membahas gambaran wilayah, kemajuan pelaksanaan SSK, profil sanitasi saat ini, serta area berisiko dan permasalahan mendesak sanitasi Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro.

Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi

Membahas visi dan misi sanitasi Kabupaten Kepulauan.Siau Tagulandang Biaro, pentahapan pengembangan sanitasi yang meliputi: tahapan pengembangan sanitasi; tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi; skenario pencapaian sasaran serta membahas kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi

Berisikan penjelasan detail mengenai strategi pengembangan sanitasi yang meliputi: air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase perkotaan.

Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Menyajikan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi yang meliputi: air limbah domestik, pengelolaan persampahan, drainase perkotaan, dan PHBS terkait sanitasi baik pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan non pemerintah maupun *funding gap*.

Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

Memberikan gambaran umum struktur monev capaian strategi sanitasi kota/kabupaten meliputi: capaian stratejik, capaian kegiatan, evaluasi dan pelaporan monev implementasi SSK.

BAB 2

Profil Sanitasi Saat Ini

2.1. Gambaran Wilayah

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dikenal dengan negeri 47 pulau yang membentang dari Selatan ke Utara dengan luas daratan mencapai 297,95 km². Dari sekian pulau yang ada, 7 (tujuh) pulau berpenghuni dan 40 (empat puluh) tidak berpenghuni. Pulau Siau adalah yang terbesar, kemudian Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro. Ibu Kota Kabupaten berkedudukan di Ondong (Kecamatan Siau Barat).

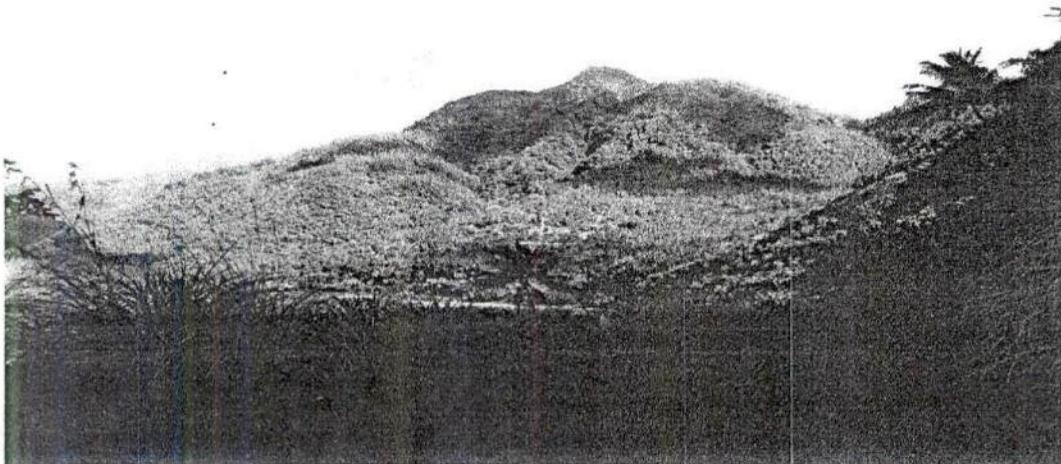
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terletak antara 2° 07' 48" – 2° 48' 36" LU dan 125° 09' 36" – 125° 29' 24" BT, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Sebelah Timur : Laut Maluku dan Laut Pasifik
- Sebelah Selatan : Kabupaten Minahasa Utara
- Sebelah Barat : Laut Sulawesi

Kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada umumnya memiliki bentuk wilayah yang berbukit dan bergunung, dan memiliki kemiringan lereng yang curam. Meskipun curam, daerah ini masih dimanfaatkan penduduk untuk ditanami dengan tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh dan pala. Daerah dataran relatif sempit dan umumnya hanya terdapat di pesisir pantai yang dijadikan tempat pemukiman penduduk, seperti di Ulu, Ondong (Pulau Siau), Buhias (Pulau Tagulandang) dan Lamanggo (Pulau Biaro). Daerah yang memiliki bentuk wilayah yang memiliki kemiringan lereng di Pulau Siau dapat dijumpai di

Pihise dan Pangirolong, sedangkan di Pulau Tagulandang dapat dijumpai di Apengmulengen.

Ketinggian tempat di pulau Siau bervariasi antara 0 meter dari permukaan laut (m dpl) sampai 1.784 m dpl yang merupakan tempat tertinggi yaitu puncak gunung Karangetang. Ondong sebagai pusat kegiatan terletak pada ketinggian + 0 – 10 m dpl hal yang sama dengan Ulu sebagai pusat perdagangan dan jasa. Ketinggian tempat di Pulau Tagulandang bervariasi dari 0 m dpl sampai 784 m dpl (Wuluri Balinge), sedangkan di Pulau Biaro bervariasi antara 0 m dpl sampai 323 m dpl.



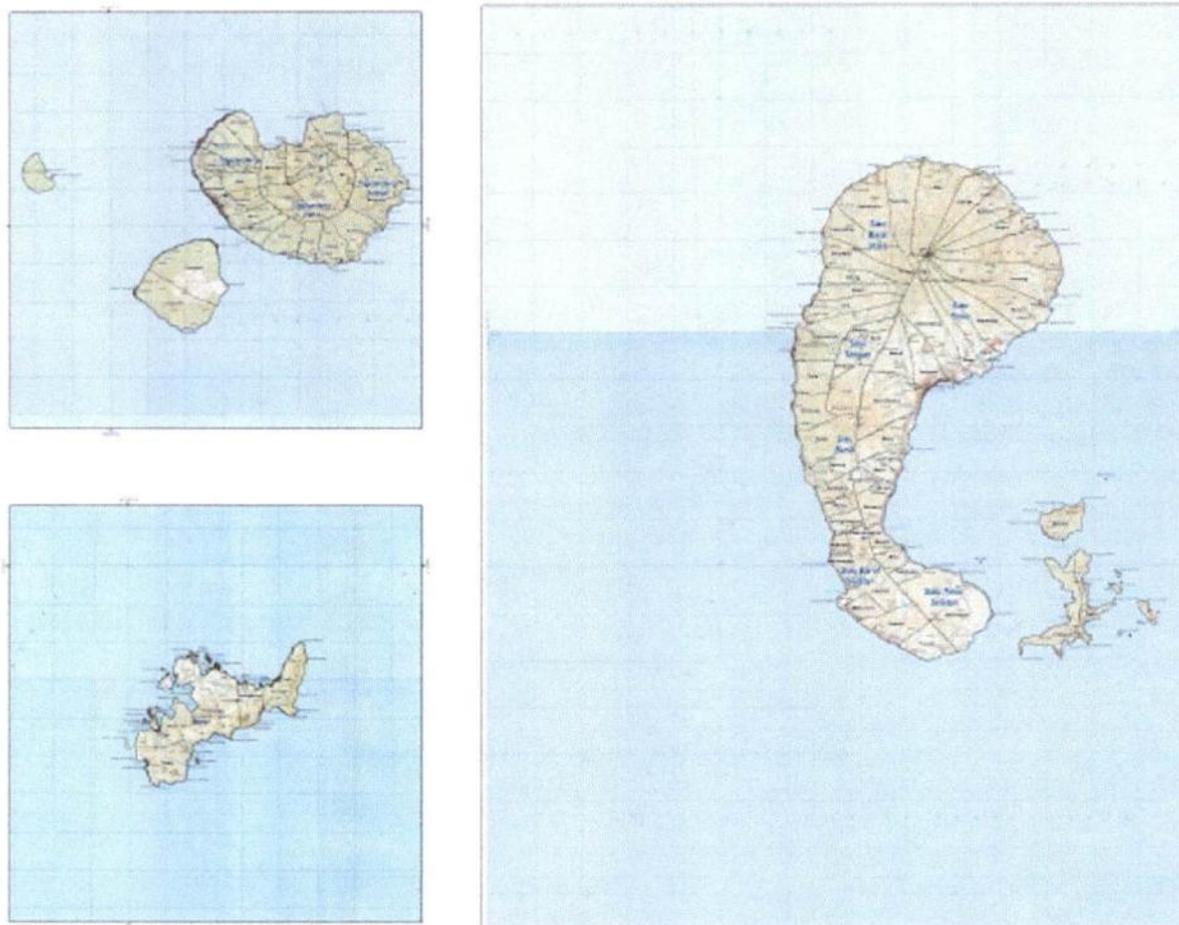
Gambar 2.1
Gambaran Wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang

Jarak antara Ibukota Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Ondong) dengan Ibukota Propinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) adalah 85 mil laut (157,42 km). Sedangkan jarak rentang kendali di Kabupaten ini dengan tempat-tempat lain adalah sebagai berikut :

- Ulu Siau (Kec. Siau Timur) – Buhias (Kec. Tagulandang) : 21 mil laut
(38,892 Km)
- Ulu Siau (Kec. Siau Timur) – Biaro (Kec. Biaro) : 41 mil laut
(75, 932 Km)
- Ulu Siau (Kec. Siau Timur) – Tahuna (Kab. Kepl Sangihe) : 60 mil laut
(111, 12 Km)
- Ulu Siau (Kec. Siau Timur) – Manado : 85 mil laut
(157, 42 Km)

Peta dan tabel berikut memperlihatkan gambaran tentang wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan luas wilayah yang dirinci setiap kecamatan.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kajian SSK



Tabel 2.1.
Tabel Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan
serta Jumlah Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(%) thd total administrasi	(Ha)	(%) thd luas administrasi
Siau Timur	5 Kelurahan / 11 Desa	5.594	20,27	1.118,80	4,05
Siau Timur Selatan	14 Desa	2.406	8,72	481,20	1,74
Siau Tengah	4 Desa	1.180	4,28	236,00	0,86
Siau Barat	3 Kelurahan / 9 Desa	3.492	12,65	698,40	2,53
Siau Barat Utara	8 Desa	1.820	6,60	364,00	1,32
Siau Barat Selatan	7 Desa	1.510	5,47	302,00	1,09
Tagulandang	2 Kelurahan / 13 Desa	5.553	20,12	1.110,60	4,02
Tagulandang Utara	6 Desa	1.792	6,49	358,40	1,3
Tagulandang Selatatan	6 Desa	2.163	7,84	432,60	1,57
Biaro	5 Desa	2.085	7,56	417,00	1,51
TOTAL	10/83	27.595	100	5.519,00	20

Sumber : BAPPEDA Kab. Kepl Siau Tagulandang Biaro.

Selain gambaran wilayah, jumlah penduduk merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam perencanaan. Penduduk suatu wilayah adalah subjek dan objek pembangunan sehingga diperlukan data untuk keakuratan proyeksi yang akan dilakukan. Aspek-aspek kependudukan yang dibahas dalam laporan ini meliputi jumlah dan perkembangan penduduk, penyebaran, kepadatan penduduk serta hasil proyeksi sampai dengan Tahun 2020.

Sesuai hasil perhitungan untuk proyeksi jumlah penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan menggunakan formulasi bunga berganda – asumsi rata-rata jumlah penduduk bertambah berlipat ganda setiap tahunnya – dan laju pertumbuhan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai hasil perhitungan adalah sebesar **1,47%** per tahunnya. Formulasi untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk adalah sebagai : $P_n = P_o (1 + r)^n$, dengan:

P_n : jumlah penduduk pada tahun n,

- Po : jumlah penduduk tahun awal,
r : rata-rata pertumbuhan penduduk
n : periode waktu

Data dasar dalam menghitung proyeksi jumlah penduduk adalah data jumlah penduduk tahun 2015.

Tabel 2.2.1
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk													
	Wilayah Perdesaan													
	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Siau Timur	8,064	2,016	8,183	2,046	8,303	2,076	8,425	2,106	8,549	2,137	8,674	2,169	8,802	2,200
Siau Barat	5,805	1,451	5,890	1,473	5,977	1,494	6,065	1,516	6,154	1,538	6,244	1,561	6,336	1,584
Tagulandang	9,267	2,317	9,403	2,351	9,541	2,385	9,682	2,420	9,824	2,456	9,968	2,492	10,115	2,529
Siau Timur Selatan	8,736	2,184	8,864	2,216	8,995	2,249	9,127	2,282	9,261	2,315	9,397	2,349	9,535	2,384
Siau Barat Selatan	4,649	1,162	4,717	1,179	4,787	1,197	4,857	1,214	4,928	1,232	5,001	1,250	5,074	1,269
Tagulandang Utara	4,569	1,142	4,636	1,159	4,704	1,176	4,773	1,193	4,844	1,211	4,915	1,229	4,987	1,247
Biaro	3,755	939	3,810	953	3,866	967	3,923	981	3,981	995	4,039	1,010	4,099	1,025
Siau Barat Utara	4,428	1,107	4,493	1,123	4,559	1,140	4,626	1,157	4,694	1,174	4,763	1,191	4,833	1,208
Siau Tengah	1,958	490	1,987	497	2,016	504	2,046	511	2,076	519	2,106	527	2,137	534
Tagulandang Selatan	4,630	1,158	4,698	1,175	4,767	1,192	4,837	1,210	4,908	1,228	4,980	1,246	5,054	1,264
JUMLAH	55,861	13,966	56,682	14,171	57,515	14,379	58,361	14,591	59,219	14,805	60,089	15,023	60,973	15,244

Sumber : Dinas Pemberdayaan Capil dan Analisis Pokja

Tabel 2.2.2
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk													
	Wilayah Perkotaan													
	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Siau Timur	10,049	2,512	10,197	2,549	10,347	2,587	10,499	2,625	10,653	2,663	10,810	2,702	10,969	2,742
Siau Barat	3,225	806	3,272	818	3,321	830	3,369	842	3,419	855	3,469	867	3,520	880
Tagulandang	4,677	1,169	4,746	1,186	4,816	1,204	4,886	1,222	4,958	1,240	5,031	1,258	5,105	1,276
JUMLAH	17,951	4,488	18,215	4,554	18,483	4,621	18,754	4,689	19,030	4,758	19,310	4,827	19,594	4,898

Sumber : Dinas Pemberdayaan Capil dan Analisis Pokja

Tabel 2.2.3
Total Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Wilayah Perdesaan dan Perkoataan													
	Total													
	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Siau Timur	18,113	4,528	18,379	4,595	18,649	4,662	18,924	4,731	19,202	4,800	19,484	4,871	19,770	4,943
Siau Barat	9,030	2,258	9,163	2,291	9,297	2,324	9,434	2,359	9,573	2,393	9,714	2,428	9,856	2,464
Tagulandang	13,944	3,486	14,149	3,537	14,357	3,589	14,568	3,642	14,782	3,696	14,999	3,750	15,220	3,805
Siau Timur Selatan	8,736	2,184	8,864	2,216	8,995	2,249	9,127	2,282	9,261	2,315	9,397	2,349	9,535	2,384
Siau Barat Selatan	4,649	1,162	4,717	1,179	4,787	1,197	4,857	1,214	4,928	1,232	5,001	1,250	5,074	1,269
Tagulandang Utara	4,569	1,142	4,636	1,159	4,704	1,176	4,773	1,193	4,844	1,211	4,915	1,229	4,987	1,247
Biaro	3,755	939	3,810	953	3,866	967	3,923	981	3,981	995	4,039	1,010	4,099	1,025
Siau Barat Utara	4,428	1,107	4,493	1,123	4,559	1,140	4,626	1,157	4,694	1,174	4,763	1,191	4,833	1,208
Siau Tengah	1,958	490	1,987	497	2,016	504	2,046	511	2,076	519	2,106	527	2,137	534
Tagulandang Selatan	4,630	1,158	4,698	1,175	4,767	1,192	4,837	1,209	4,908	1,227	4,980	1,245	5,054	1,263
JUMLAH	73,812	18,453	74,897	18,724	75,998	19,000	77,115	19,279	78,249	19,562	79,399	19,850	80,566	20,142

Sumber : Dinas Pemberdayaan Capil dan Analisis Pokja

Tabel 2.3
Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Saat Ini dan Proyeksinya Untuk 5 Tahun

No	Nama Kecamatan	Tingkat Pertumbuhan (%)						Kepadatan Penduduk (Orang/Ha)					
		Tahun						Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Siau Timur	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	19	19	19	20	20	20
2	Siau Barat	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	14	15	15	15	15	15
3	Tagulandang	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	14	14	15	15	15	15
4	Siau Timur Selatan	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	22	22	22	23	23	23
5	Siau Barat Selatan	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	16	16	16	16	17	17
6	Tagulandang Utara	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	13	13	13	14	14	14
7	Biaro	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	9	9	9	10	10	10
8	Siau Barat Utara	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	12	13	13	13	13	13
9	Siau Tengah	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	8	9	9	9	9	9
10	Tagulandang Selatan	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	11	11	11	11	12	12

Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017

Masih adanya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah merupakan salah satu indikator dan barometer pemerintah untuk terus bekerja keras dalam rangka penegakan komitmen pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan segenap unsur masyarakat agar tetap peduli dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sesungguhnya merupakan implementasi amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945, Pasal 27 yakni setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, angka kemiskinan yang ada seperti yang tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Tabel Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah keluarga miskin (KK)
Siau Timur	325
Siau Timur Selatan	278
Siau Tengah	34
Siau Barat	109
Siau Barat Utara	71
Siau Barat Selatan	72
Tagulandang	587
Tagulandang Utara	113
Tagulandang Selatatan	195
Biaro	156

Sumber: BPS Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro 2015

Dalam konsep penataan ruang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian melalui pemanfaatan fungsi ruang berbasis bahari, pertanian, pariwisata dan mitigasi bencana yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Adapun ruang lingkup penataan ruang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang secara administratif memiliki luas wilayah 275,95 km², yang terdiri dari 47 pulau dimana sebanyak 12 pulau sudah berpenghuni, dan 35 pulau belum berpenghuni. Terdapat 5 Buah Gunung, salah satunya Gunung karangetang yang di kenal sebagai gunung berapi yang statusnya masih sangat aktif. Kabupaten Kepulauan

Siau Tagulandang Biaro terbagi menjadi 10 Kecamatan, dimana pada tahun 2012 dari sejumlah kecamatan tersebut terbagi lagi kedalam 83 Desa dan 10 Kelurahan.

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

Rencana struktur ruang adalah dengan menetapkan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, terdiri atas :

- a. Pusat-pusat kegiatan;
- b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Sehubungan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai daerah kepulauan, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud berkaitan dengan satuan wilayah pengembangan dengan sistem klaster pengembangan:

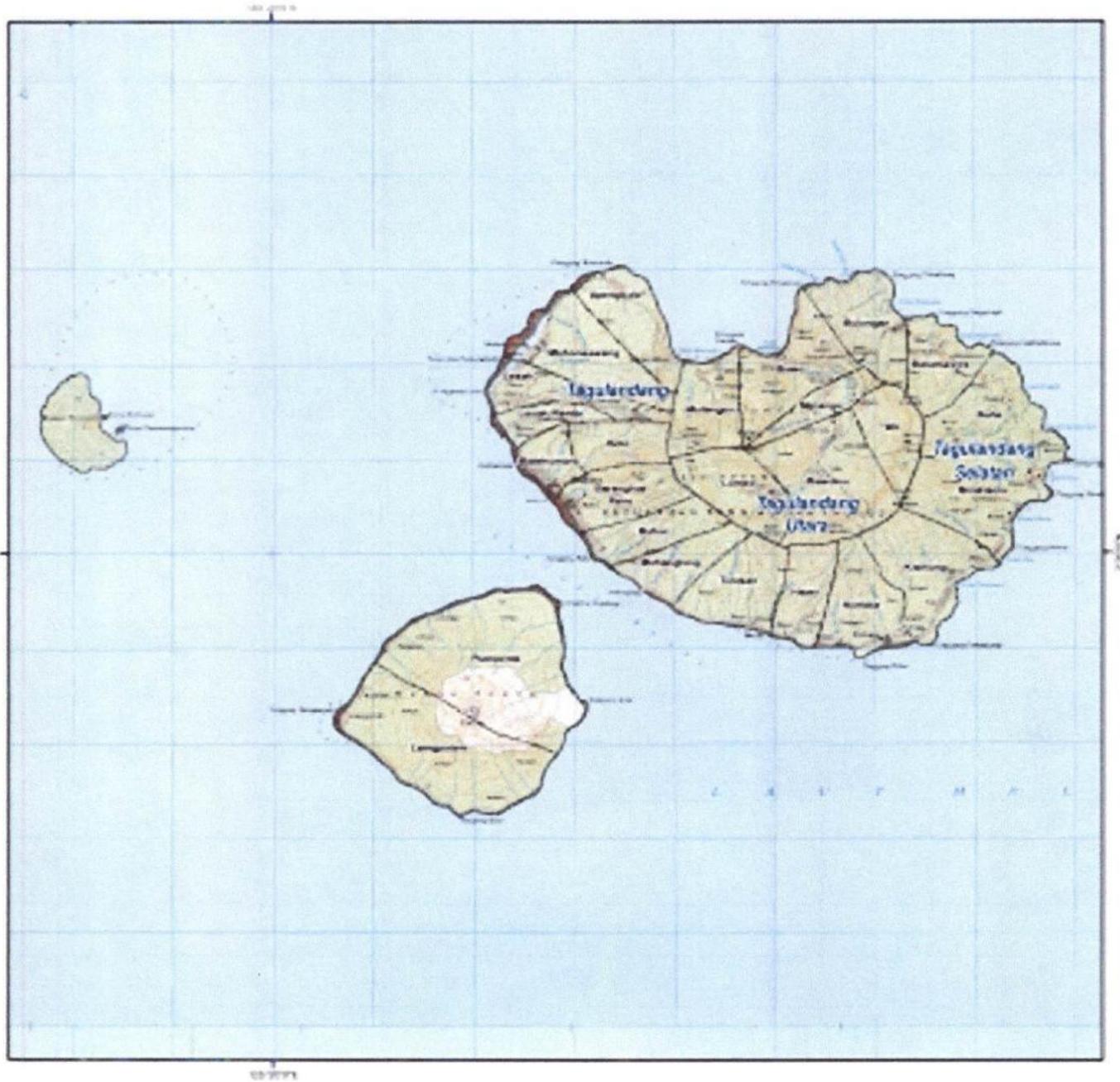
- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro meliputi:
 - a. Pusat-pusat kegiatan, terdiri atas:
 - PKSNp (Pusat Kegiatan Strategis Nasional promosi), yaitu: Ondong (Kecamatan Siau Barat)
 - PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah promosi), yaitu: Ulu (Kecamatan Siau Timur)
 - PKL (Pusat Kegiatan Lokal), yaitu: Buhias (Kecamatan Tagulandang)
 - PPK (Pusat Pelayanan Kawasan); yaitu: Sawang di Kecamatan Siau Timur Selatan, Talawid di Kecamatan Siau Barat Selatan, Bawoleu di Kecamatan Tagulandang Utara, Kisihang di Kecamatan Tagulandang Selatan, Lamanggo di kecamatan Biaro.
 - PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan), yaitu: Hiung di Kecamatan Siau Barat Utara, Beong di Kecamatan Siau Tengah, Makalehi di Kecamatan Siau Barat, Pahepa di Kecamatan Siau Timur Selatan dan Minanga di Kecamatan Tagulandang Utara.
 - b. Sistem jaringan prasarana utama, meliputi:
 - sistem jaringan transportasi darat
 - sistem jaringan transportasi laut, dan
 - sistem jaringan transportasi udara.

c. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

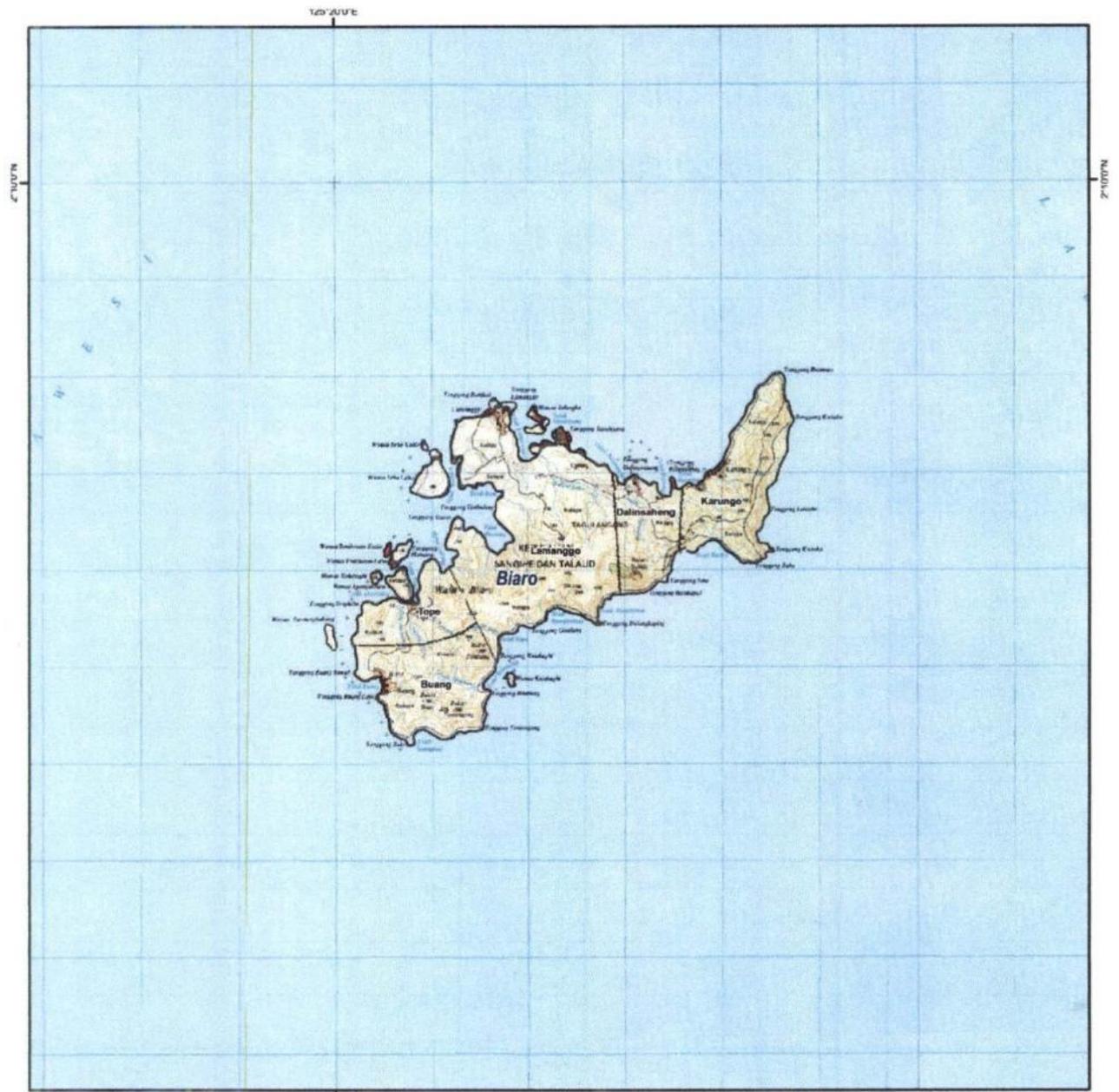
- sistem jaringan energi
- sistem jaringan telekomunikasi
- sistem jaringan sumberdaya air, dan
- sistem prasarana pengelolaan lingkungan, yang terdiri atas: sistem jaringan air minum, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan drainase, jalur evakuasi bencana, sistem pengelolaan air limbah dan sistem sarana umum dan sosial.

Peta-peta berikut memperlihatkan rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan dokumen RTRW Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2014 – 2034.

Gambar 2.3.2 Peta Struktur Ruang Klaster Pulau Tagulandang



Gambar 2.3.3 Peta Struktur Ruang Klaster Pulau Biaro



2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK

Melihat kemajuan pelaksanaan pembangunan sanitasi dengan mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dan memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kabupaten, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif.

Tabel 2.5.
Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Air Limbah Domestik

SSK Thn 2013 – Thn 2015			SSK 2016
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Tercapainya kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat Kab.Kepl.Siau Tagulandang Biaro Stop BABS di tahun 2020	BABs sebesar 11.6%	Berdasarkan hasil studi EHRA masyarakat yang masih melakukan praktik BABs sebesar 4.9%
	100% penduduk memiliki jamban pribadi di tahun 2020	Masyarakat yang memiliki jamban pribadi sebesar 90,1%	Berdasarkan hasil studi EHRA masyarakat yang memiliki jamban sebesar 92% (Jamban dgn tangki septik tidak aman sebesar 68.72%)

Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten Siau Tagulandang tahun 2013

2.2.1. Persampahan

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan persampahan di Kabupaten Kepl.Siau Tagulandang Biaro, perlu ada keselarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat.

Tabel 2.6.
Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Persampahan

SSK Thn 2013 – Thn 2015			SSK 2016
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini

(1)	(2)	(3)	(4)
Mengurangi volume timbunan sampah ke TPA Tanaki	Sampah yang terangkut ke TPA sebesar 85,00% pada tahun 2020	Sampah yang terlayani dan diangkut mencapai % dengan Dump Truck tersedia 3 Unit dan 3 Unit Motor Sampah	Berdasarkan studi EHRA sampah yang terkumpul dan terangkut sebesar 35%
Mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam sistem pengelolaan persampahan	Pihak swasta dan lembaga donor berkontribusi dalam pengelolaan persampahan	Pihak swasta yang telah berpartisipasi yaitu perbankan di Kab.Kepl.Siau Tagulandang Biaro	
Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan persampahan	SKPD terkait memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan persampahan	SKPD yang menangani Dinas Kebersihan dan Tata Ruang dan KLHD	
	Tersusunnya Perda yang mengatur mengenai pengelolaan TPA	Perda No.06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan	

Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten Siau Tagulandang tahun 2013

2.2.2. Drainase

Pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan secara menyeluruh. Penanganan drainase perkotaan di Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah dengan kondisi topografi kurang lebih 70% merupakan daerah perbukitan dan bergunung, dan memiliki kemiringan lereng yang cukup curam dan selebihnya daerah datar yang terdapat di pesisir pantai yang dijadikan tempat pemukiman penduduk.

Tabel 2.7.
Kemajuan Pelaksanaan SSK Untuk Drainase

SSK Thn 2013 – Thn 2015			SSK 2016
Tujuan	Sasaran	Data dasar*	Status saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan fungsi drainase	Berkurangnya luas genangan 108.6 ha menjadi ...ha pada akhir tahun 2020	Luas genangan sebesar 106,6 Ha. Dimana sebagian besar	Adanya jumlah genangan sebesar 393 titik (10,6 %)

		dipengaruhi oleh Topografi berbukit dan Lereng (Drainase lebih tinggi dari Lahan)	
Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pola pemberdayaan masyarakat	Mengembalikan fungsi drainase sebagai pembuangan limbah air hujan		

Sumber : Strategi Sanitasi Kabupaten Siau Tagulandang Biaro tahun 2013

2.3. Profil Sanitasi Saat Ini

Penilaian Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun non-teknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi di masih belum memadai.

2.3.1. Air Limbah Domestik

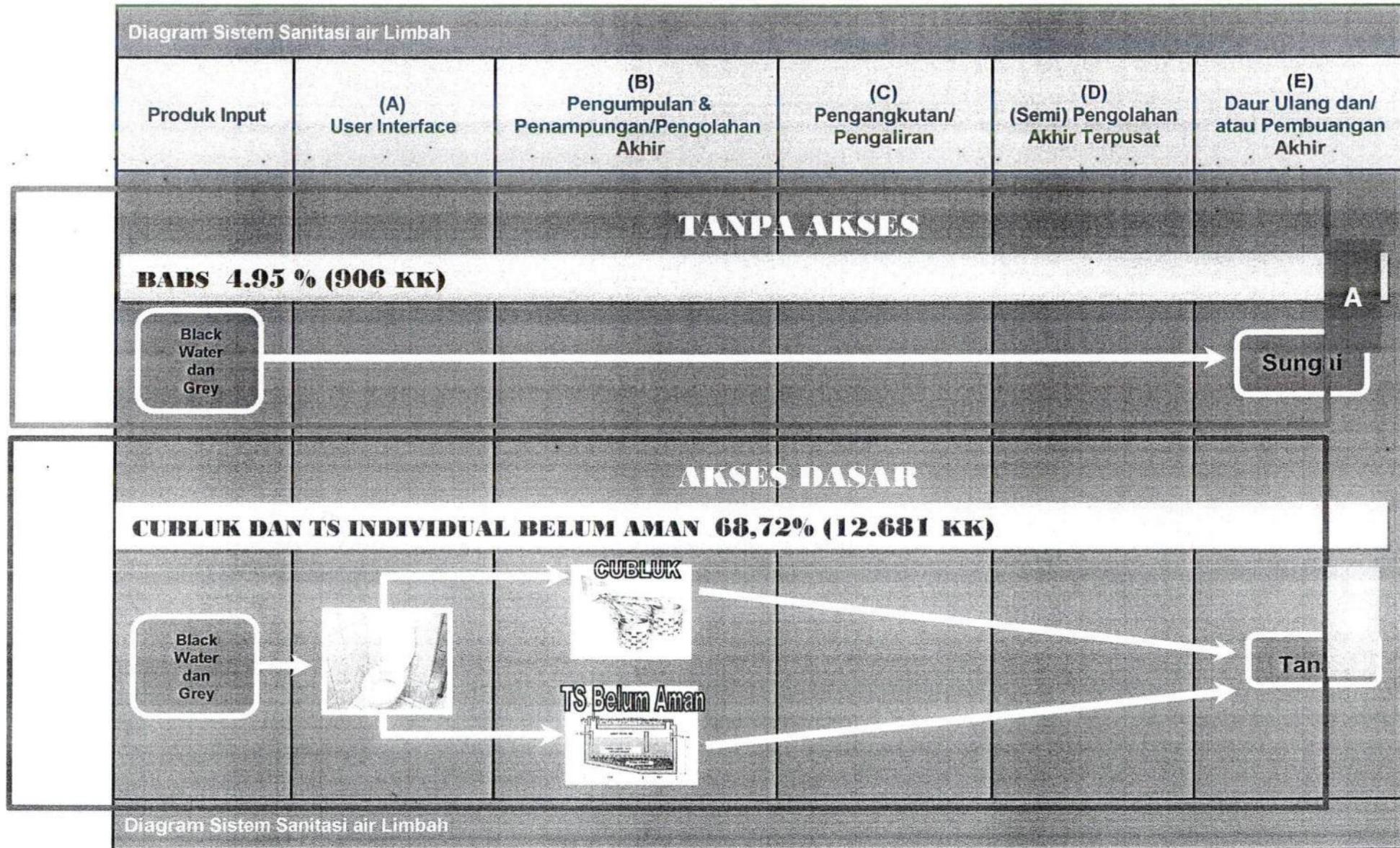
Limbah domestik atau sering juga disebut limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian dan kotoran manusia. Seperti pada limbah pada umumnya limbah rumah tangga merupakan buangan yang berbentuk cair, gas dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sulit untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera, dan sebagainya. Air limbah harus dikelola untuk mengurangi pencemaran. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan peresapan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya, tidak mengotori permukaan tanah sehingga bisa mengakibatkan tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya, tidak menimbulkan bau yang mengganggu.

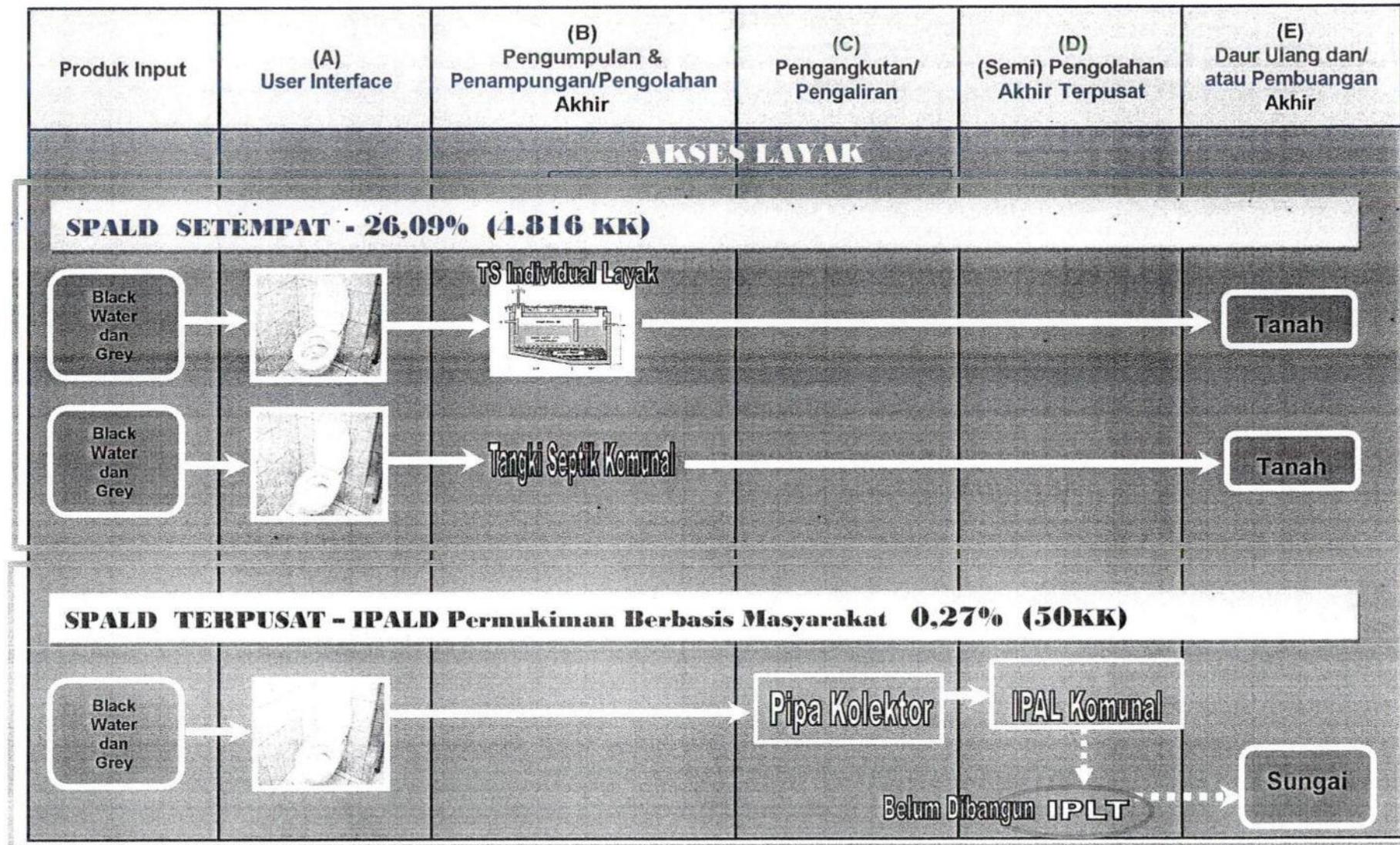
Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas *black water* yang berasal dari tinja, *urine*, air pembersih dan air penggelontor. Umumnya menggunakan jamban leher angsa dengan konstruksi penampungan dan pengumpulan berupa tangki septic tidak aman, dan cubluk. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non-tinja dialirkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke pekarangan, sistem drainase atau ke sungai.

1. Sistem dan Infrastruktur

Berdasarkan hasil kajian studi EHRA dan data sekunder yang dikumpulkan oleh pokja sanitasi didapatkan sistem air limbah domestik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro seperti digambarkan pada Gambar 2.1 Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik sebagai berikut.

Gambar 2.4 Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik





Tabel.2.8 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (KK)	TANPA AKSES (KK)	AKSES DASAR (KK)	AKSES LAYAK					
					SPALD SETEMPAT			SPALD TERPUSAT		
					Jamban keluarga dgn tangki septik aman (KK)	MCK /Jamban Bersama (KK)	MCK Komunal (KK)	Tangki Septik Komunal > 10 KK (KK)	IPAL Komunal (KK)	IPAL KAWASAN (KK)
(i)	(ii)		(iii)		(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
WILAYAH PEDESAAN										
1	Kecamatan Siau Timur	2016	122	1.251	535	-	58	-	50	-
2	Kecamatan Siau Barat	1451	113	891	423	-	25	-	-	-
3	Kecamatan Tagulandang	2317	207	1.534	550	-	25	-	-	-
4	Kecamatan Siau Timur Selatan	2184	77	1.557	489	-	62	-	-	-
5	Kecamatan Siau Barat Selatan	1162	75	800	255	-	32	-	-	-
6	Kecamatan Tagulandang Utara	1142	13	757	355	-	17	-	-	-
7	Kecamatan Biaro	939	55	470	199	-	215	-	-	-
8	Kecamatan Siau Barat Utara	1107	68	865	142	-	32	-	-	-
9	Kecamatan Siau Tengah	490	55	250	173	-	11	-	-	-
10	Kecamatan Tagulandang Selatan	1158	0	901	256	-	-	-	-	-
	JUMLAH KK PEDESAAN	13965	786	9.276	3.377	-	477	-	50	-

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (KK)	TANPA AKSES (KK)	AKSES DASAR (KK)	AKSES LAYAK					
					SPALD SETEMPAT			SPALD TERPUSAT		
					Jamban keluarga dgn tangki septik aman (KK)	MCK /Jamban Bersama (KK)	MCK Komunal (KK)	Tangki Septik Komunal > 10 KK (KK)	IPAL Komunal (KK)	IPAL KAWASAN (KK)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	
WILAYAH PERKOTAAN										
1	Kecamatan Siau Timur	2512	41	2036	389	-	46	-	-	-
2	Kecamatan Siau Barat	806	4	607	195	-	-	-	-	-
3	Kecamatan Tagulandang	1169	75	762	332	-	-	-	-	-
	JUMLAH KK PERKOTAAN		121	3405	916	-	46	-	-	-
TOTAL PERKOTAAN DAN PEDESAAN		18.453	906	12.681	4.293	-	523	-	50	-

Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah dimana hal tersebut didasari oleh ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakukan penyedotan lumpur tinja.

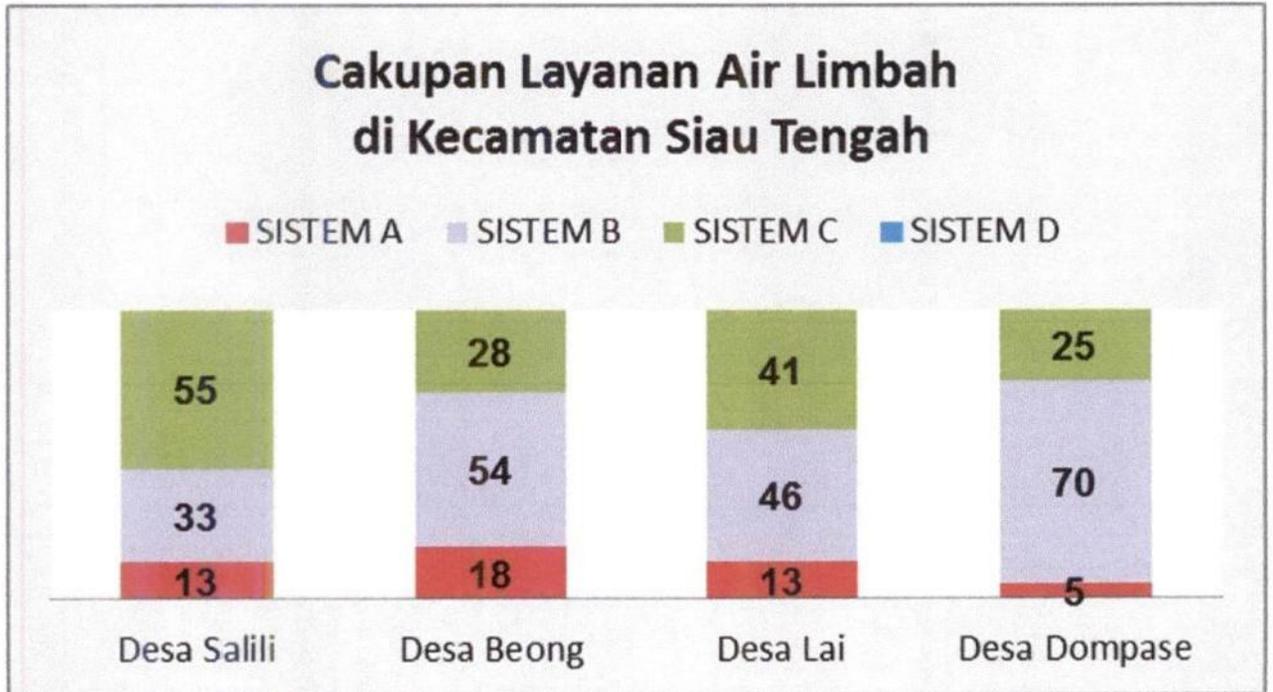
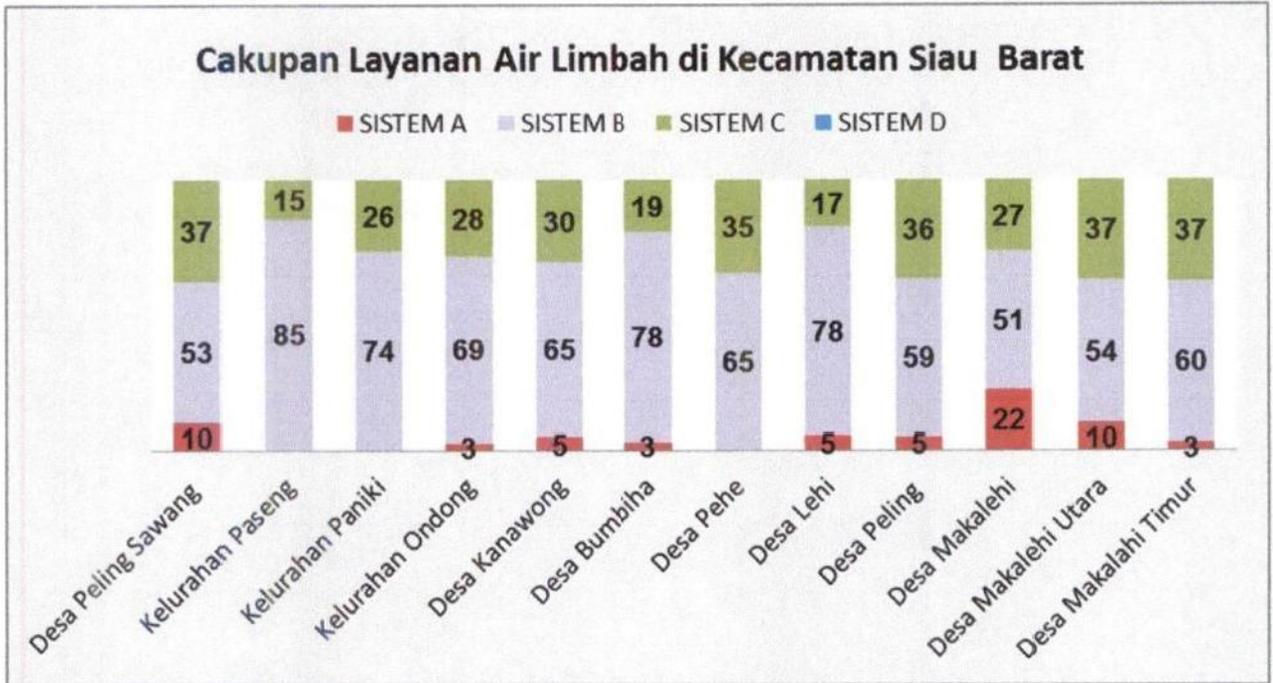
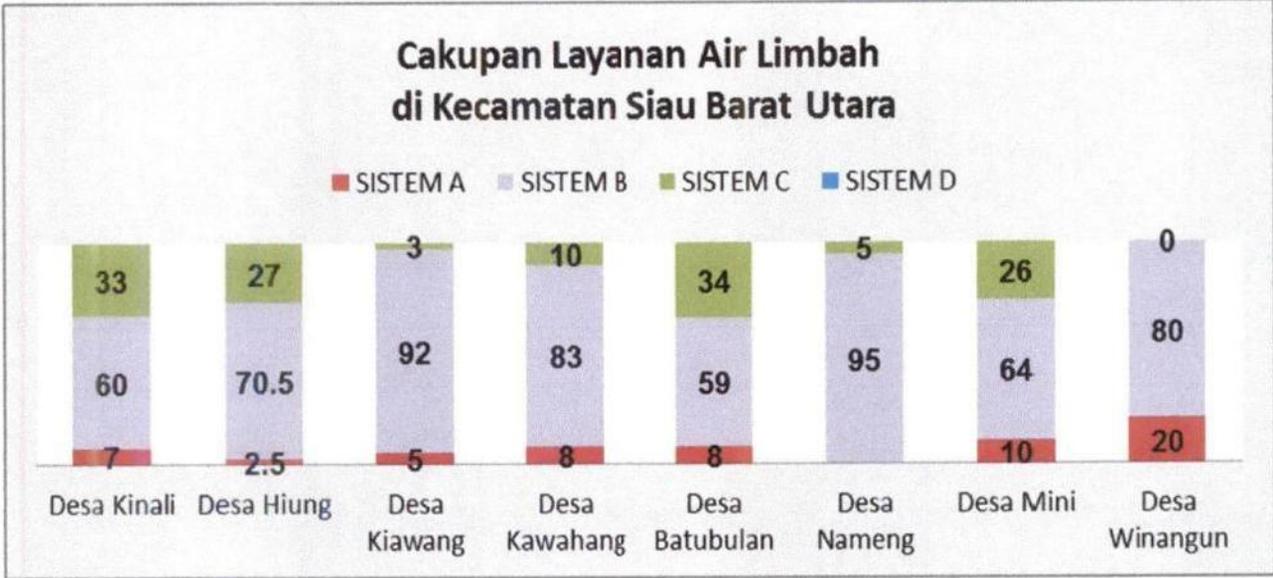
Tabel 2.9
Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Keterangan
				Berfungsi	Tdk berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
SPAL Setempat (Sistem Onsite)						
1	Berbasis komunal					
	- MCK Komunal	unit	29	29		
2.	Truk Tinja	unit	-	-	-	-
3.	IPLT : kapasitas	M3/hari	-	-	-	-
SPAL Terpusat (Sistem Offsite)						
1.	Berbasis komunal					
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	-	-	-
	- IPAL Komunal	unit	1	1		
2.	IPAL Kawasan/Terpusat		-	-	-	-
	- Kapasitas	M3/hari	-	-	-	-
	- Sistem		-	-	-	-

Gambar 2.5 Peta Cakupan Layanan Air Limbah Domestik

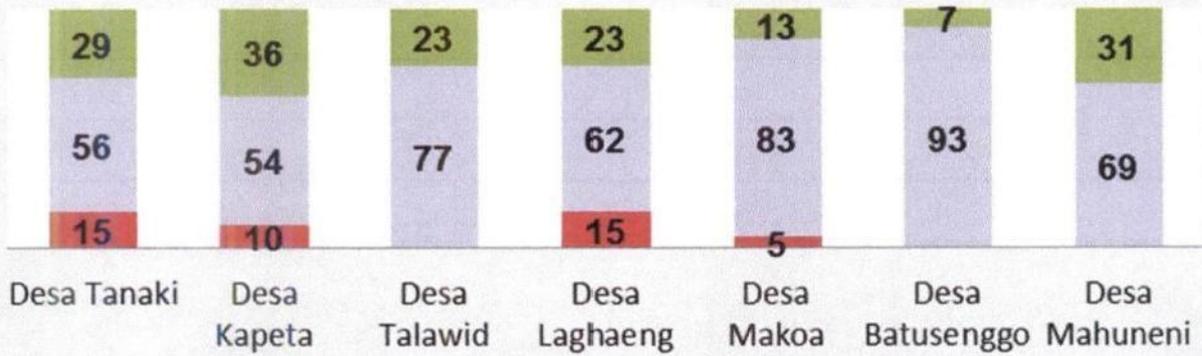


WILAYAH SIAU



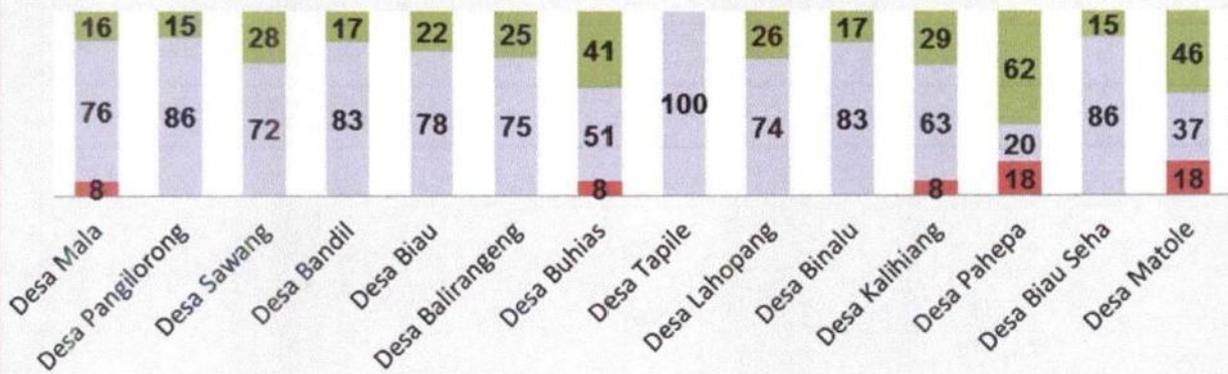
Cakupan Layanan Air Limbah di Kecamatan Siau Barat Selatan

■ SISTEM A ■ SISTEM B ■ SISTEM C ■ SISTEM D



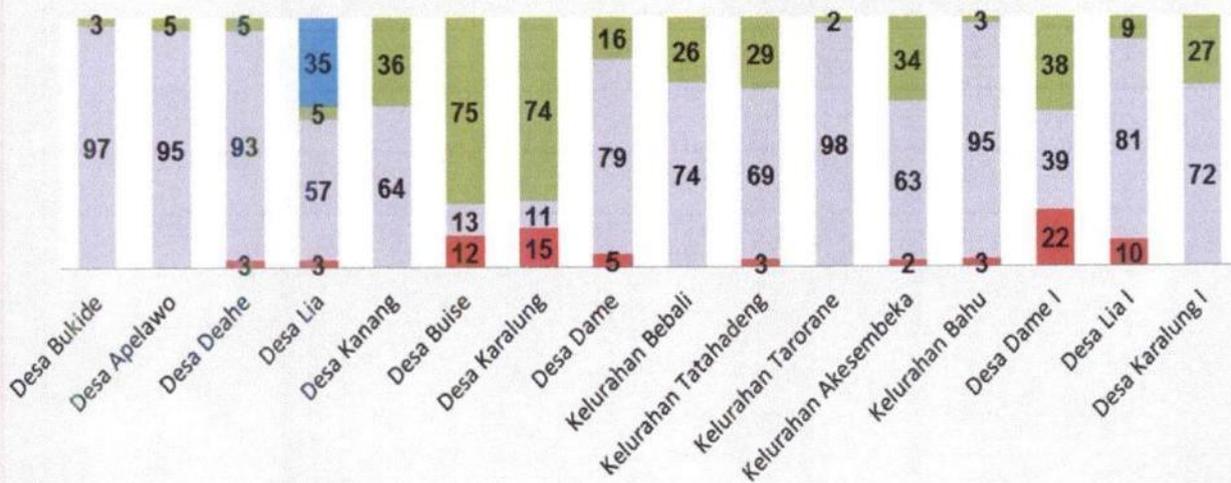
Cakupan Layanan Air Limbah di Kecamatan Siau Timur Selatan

■ SISTEM A ■ SISTEM B ■ SISTEM C ■ SISTEM D



Cakupan Layanan Air Limbah Di Kecamatan Siau Timur

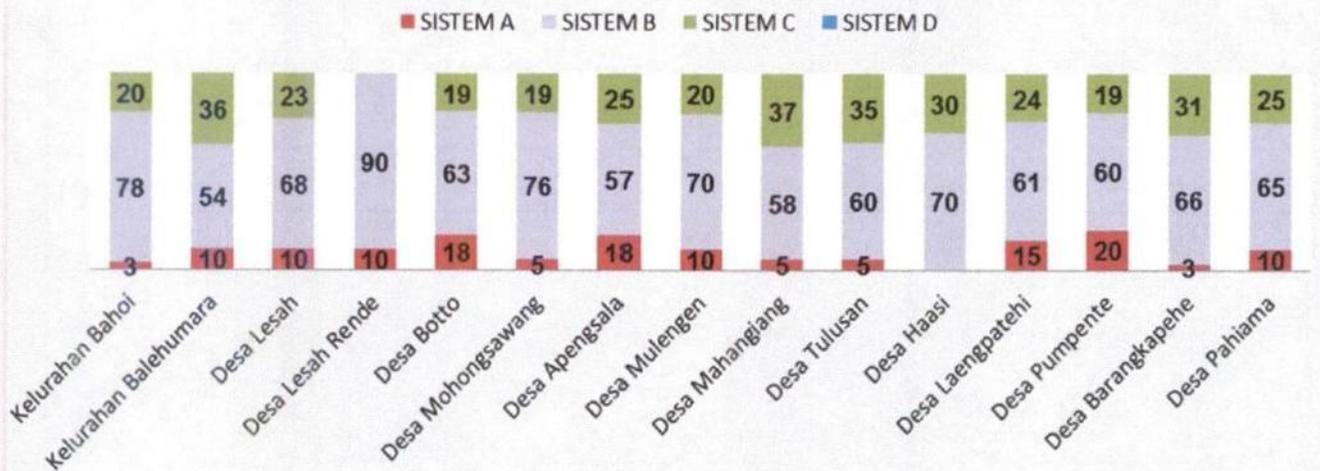
■ SISTEM A ■ SISTEM B ■ SISTEM C ■ SISTEM D



WILAYAH TAGULANDANG

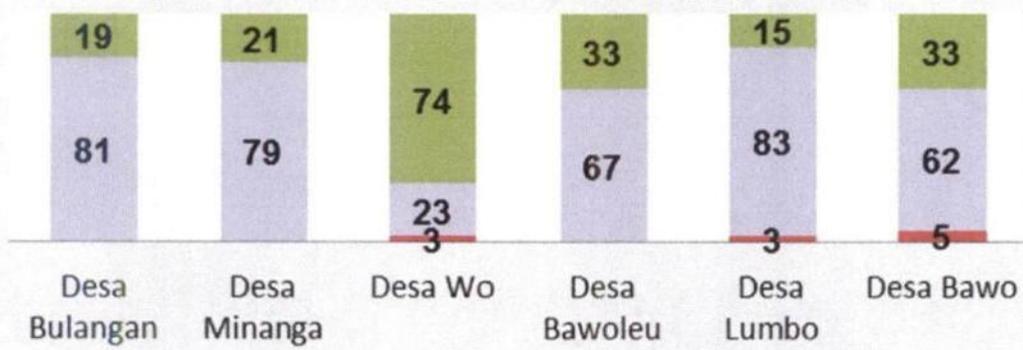


Cakupan Layanan Air Limbah di Kecamatan Tagulandang



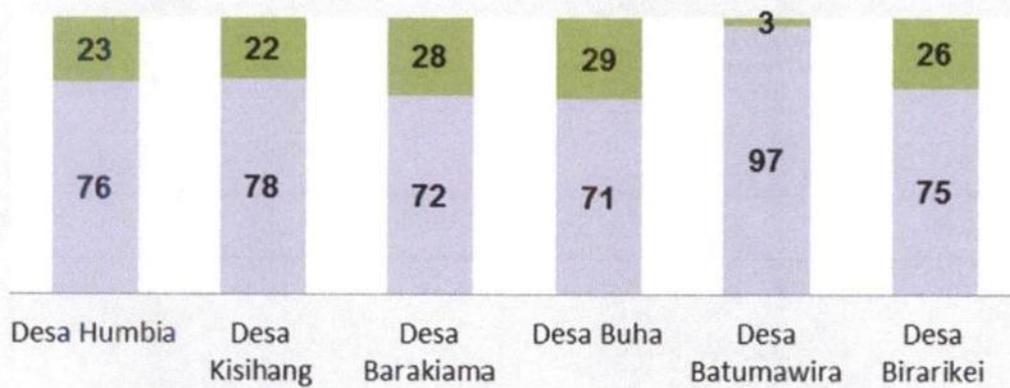
Cakupan Layanan Air Limbah di Kecamatan Tagulandang Utara

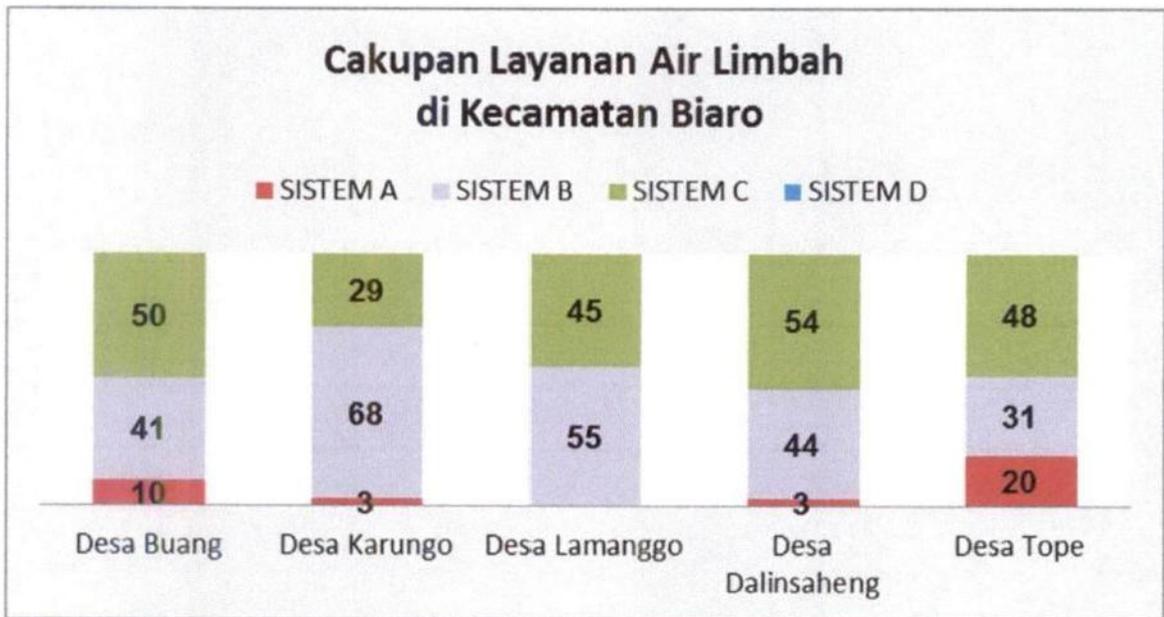
■ SISTEM A ■ SISTEM B ■ SISTEM C ■ SISTEM D



Cakupan Layanan Air Limbah di Kecamatan Tagulandang Selatan

■ SISTEM A ■ SISTEM B ■ SISTEM C ■ SISTEM D





Keterangan :

- A : Praktik Babs
- B : Akses Dasar
- C : SPALD Setempat
- D : SPALD Terpusat

A : 906 KK (4,95%)
B : 12.681 KK (68,72%)
C : 4.816 KK (26,09%)
D : 50 KK (0,27%)

2. Kelembagaan dan Peraturan

Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas SKPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi SKPD Kantor Lingkungan Hidup Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan.

Institusi pemerintahan tersebut memiliki korelasi yang kuat, dimana Dinas Pekerjaan Umum berperan sebagai operator karena lebih bersifat teknis dan Kantor Lingkungan Hidup Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga sangat penting.

Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta dan pemerintah maka upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah nyata, sehingga berpengaruh pada belum tersedianya perangkat peraturan terkait pengelolaan air limbah di tingkat daerah.

2.3.2. Persampahan

Infrastruktur persampahan yang tersedia masih terbatas dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah ada yang langsung dibakar selebihnya masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, misalnya di saluran air ataupun di tanah kosong bahkan disungai.

Ketidakterediaan ataupun minimnya sarana dan prasarana persampahan menjadi salah satu penyebab penanganan sampah masih terabaikan, disamping kemampuan, wawasan dan kesadaran masyarakat yang juga masih rendah terutama penerapan konsep 3R belum terinternalisasi dalam pengelolaan sampah.

Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan persampahan.

Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan target pembangunan nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Dalam memaksimalkan pelayanan pengelolaan persampahan perkotaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan

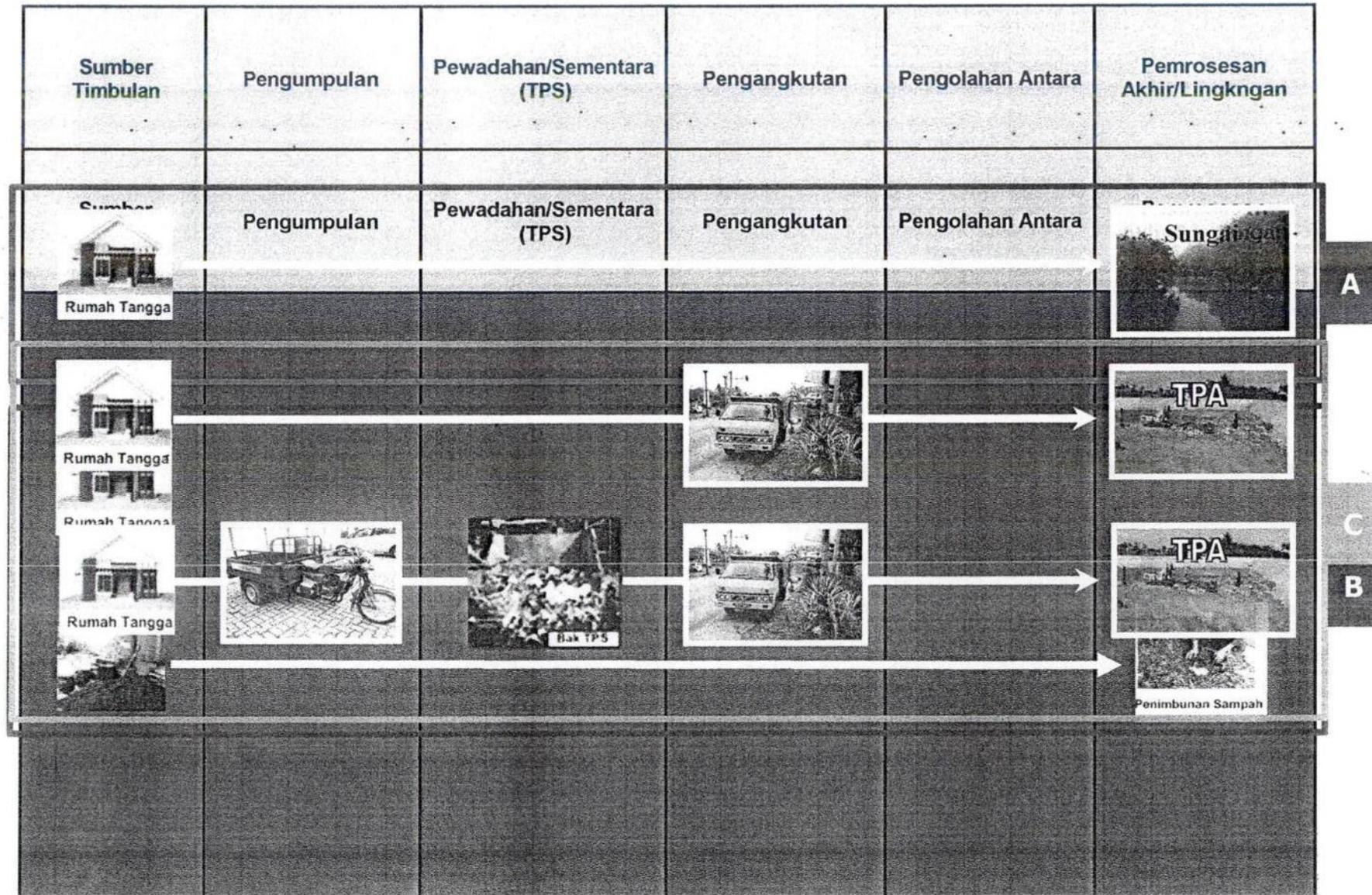
hanya pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan pelayanan yang terdiri atas beberapa kegiatan utama, antara lain adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah. Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan.

Penanganan sampah dengan cara membakar secara terbuka (*open burning*) masih menjadi pilihan yang dilakukan masyarakat. Padahal dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Juknis SPM Bidang Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa selain kegiatan transportasi dan industri, kegiatan pembakaran terbuka dan kawasan permukiman juga memiliki pengaruh terhadap kualitas udara.

Sebagian masyarakat menganggap pembakaran sampah bukanlah sesuatu yang dapat mengawatirkan, terlebih karena Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan luasan lahan yang masih sangat memadai, penggunaan bahan dan materi yang dominan masih alami, dianggap tidak memberikan intervensi terhadap kualitas udara. Padahal jika dihitung volume timbulan sampah yang dihasilkan setiap harinya dan diasumsikan dari jumlah tersebut ada yang dibakar setiap harinya, maka hal itu tetap berdampak pada pengaruhnya terhadap kualitas udara yang setiap saat dihirup.

Untuk volume timbulan sampah dan sumber timbulan sampah terbesar adalah berada pada kawasan permukiman dan perdagangan baik sampah yang organik maupun anorganik.

Gambar 2.6
Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan



A
C
B

Tabel 2.10. Penanganan Sampah Untuk Wilayah Perkotaan

	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	TANPA AKSES				AKSES LAYAK				TOTAL	
			SAMPAH TIDAK TERPROSES		SAMPAH DIKELOLA MANDIRI		SAMPAH TEREDUKSI DI TPS 3R/BANK SAMPAH		SAMPAH TERANGKUT KE TPA			
			%	(m3/hari)	%	(m3/hari)	%	(m3/hari)	%	(m3/hari)	%	(m3/hari)
1	Siau Timur	2.512	7.11%	13.12	0%	0	0%	0	6.50%	12.00	100%	25.12
2	Siau Barat	806	1.12%	2.06	0%	0	0%	0	3.25%	6.00	100%	8.06
3	Tagulandang	1.169	6.34%	11.69	0%	0	0%	0	0.00%	0.00	100%	11.69
4	Siau Timur Selatan	0	0.00%	0.00	0%	0	0%	0	0.00%	0.00	100%	0.00
5	Siau Barat Selatan	0	0.00%	0.00	0%	0	0%	0	0.00%	0.00	100%	0.00
6	Tagulandang Utara	0	0.00%	0.00	0%	0	0%	0	0.00%	0.00	100%	0.00
7	Biara	0	0.00%	0.00	0%	0	0%	0	0.00%	0.00	100%	0.00
8	Siau Barat Utara	0	0.00%	0.00	0%	0	0%	0	0.00%	0.00	100%	0.00
9	Siau Tengah	0	0.00%	0.00	0%	0	0%	0	0.00%	0.00	100%	0.00
10	Tagulandang Selatan	0	0.00%	0.00	0%	0	0%	0	0.00%	0.00	100%	0.00
TOTAL		4.488	14,57%	26,88	0%	0	0%	0	9,75%	18,00	100%	44,88

Tabel 2.11 Tabel Penanganan Sampah Untuk Wilayah Pedesaan

	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	TANPA AKSES		AKSES DASAR		AKSES LAYAK				TOTAL	
			SAMPAH TIDAK TERPROSES		SAMPAH DIKELOLA MANDIRI		SAMPAH TEREDUKSI DI TPS 3R/BANK SAMPAH		SAMPAH TERANGKUT KE TPA			
			%	(m3/hari)	%	(m3/hari)	%	(m3/hari)	%	(m3/hari)	%	(m3/hari)
1	Siau Timur	2016	10.93%	20.16	0%	0	0%	0	0.00%	0	100%	20.16
2	Siau Barat	1451	7.86%	14.51	0%	0	0%	0	0.00%	0	100%	14.51
3	Tagulandang	2317	12.52%	23.11	0%	0	0%	0	0.03%	0.06	100%	23.17
4	Siau Timur Selatan	2184	11.81%	21.80	0%	0	0%	0	0.02%	0.04	100%	21.84
5	Siau Barat Selatan	1162	6.30%	11.62	0%	0	0%	0	0.00%	0	100%	11.62
6	Tagulandang Utara	1142	6.19%	11.42	0%	0	0%	0	0.00%	0	100%	11.42
7	Biaro	939	5.09%	9.39	0%	0	0%	0	0.00%	0	100%	9.39
8	Siau Barat Utara	1107	6.00%	11.07	0%	0	0%	0	0.00%	0	100%	11.07
9	Siau Tengah	490	2.65%	4.90	0%	0	0%	0	0.00%	0	100%	4.90
10	Tagulandang Selatan	1158	6.27%	11.58	0%	0	0%	0	0.00%	0	100%	11.58
TOTAL		13.965	75,63%	139,55	0%	0	0%	0	0,05%	0.1	100%	139,65

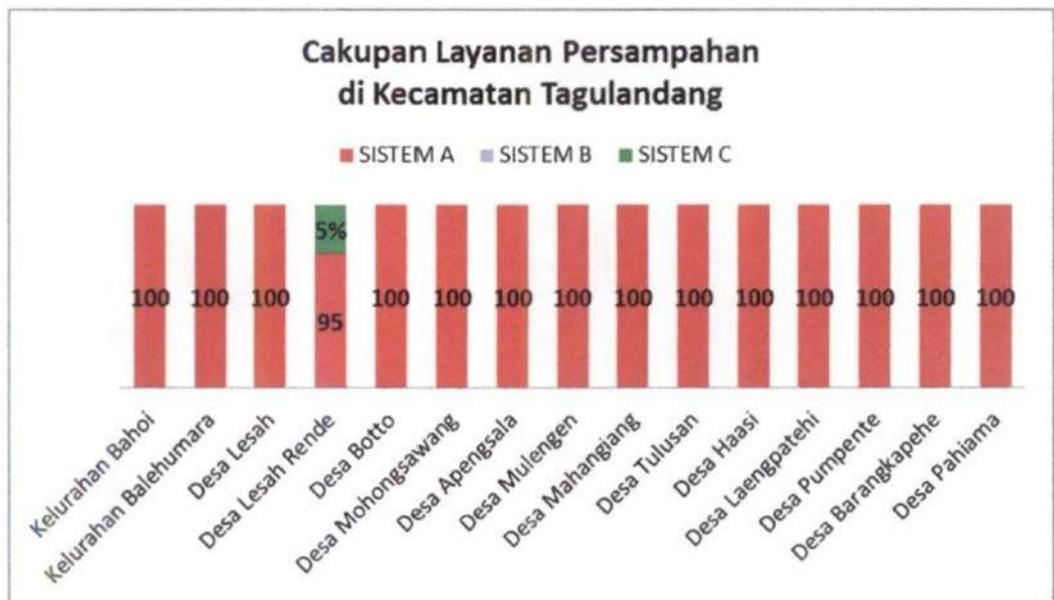
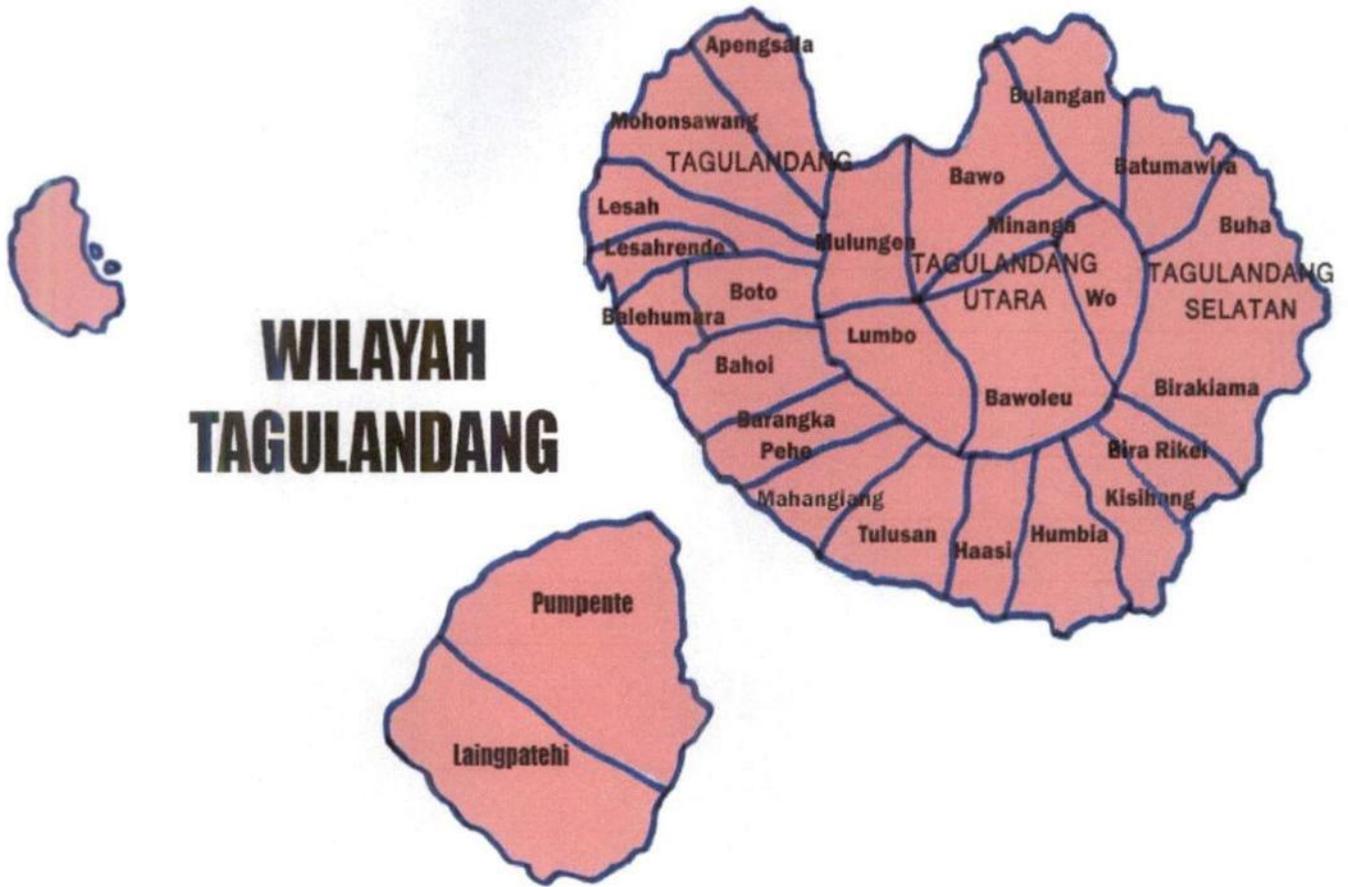
Pelayanan persampahan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro saat ini didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang kondisinya jumlahnya masih terbatas. Jumlah sarana dan prasarana persampahan di saat ini terdiri atas 3 (tiga) unit dump truck, 3 (tiga) unit Motor yang masing-masing beroperasi dengan ritasi satu kali dan TPS berjumlah 4 (empat) Unit.

Tabel 2.12
Kondisi Prasarana dan Sarana Persampahan

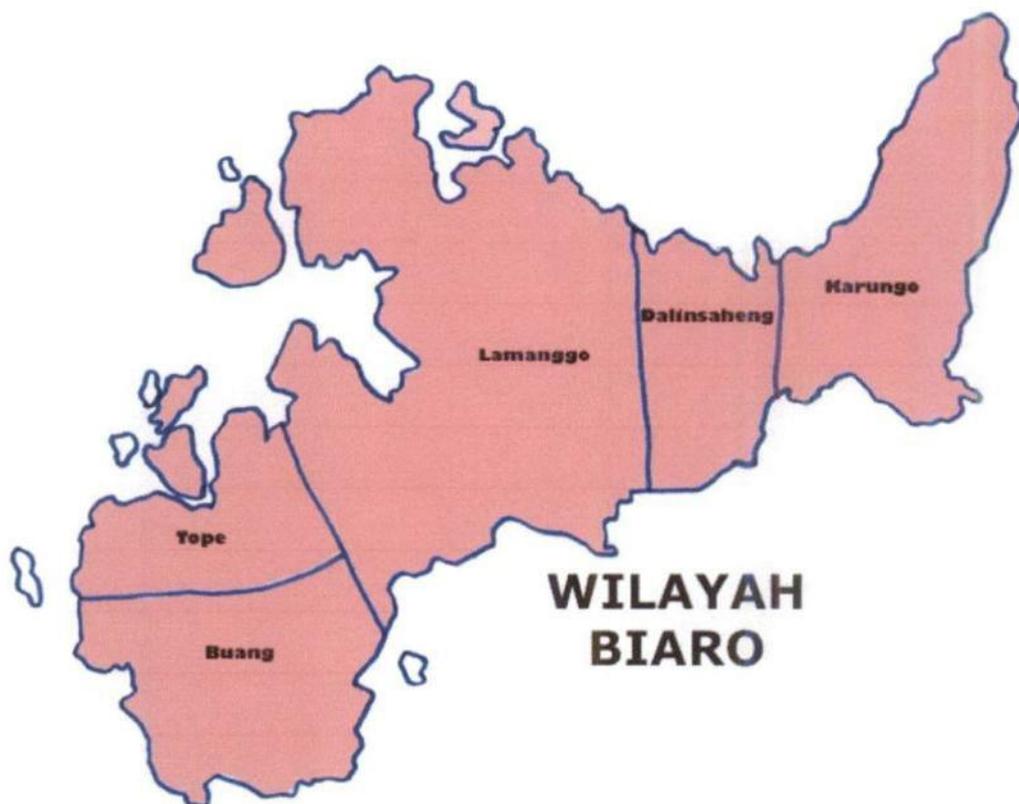
No	Jenis Prasarana/Sarana	Satuan	Jumlah	Kapasitas m ³	Ritasi /hari	Kondisi			Ket.
						Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
1	Pengumpulan Setempat								
	- Gerobak	Unit	0	0	0	0	0	0	-
	- Motor Sampah	Unit	3		1				-
	- Pick Up Sampah	Unit	0	0	0	0	0	0	-
2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)								
	- Bak Biasa	Unit	0	0	0	0	0	0	-
	- Container	Unit	4	4	1	4	0	0	-
	- Transfer depo	Unit	0	0	0	0	0	0	-
3	Pengangkutan								
	- Dump Truck	Unit	3	5	1	3	0	0	
	- Arm Roll Truck	Unit	0	0	0	0	0	0	-
	- Compactor Truck	Unit	0	0	0	0	0	0	-
4	Pengolahan Sampah								
	- TPS 3R	Unit	0	0	0	0	0	0	-
	- Bank Sampah								
	- Incenerator								
5	TPA/TPA Regional								
	- Luas Total TPA yang terpakai	Ha	5						
	- Luas sel landfill	Ha	0	0	0	0	0	0	-
	- Daya Tampung TPA	m ³ /hari	600	1000	3	1	0	0	5ha (Siau) 1ha (Taguldng)
6	Alat Berat								
	- Bulldozer	Unit	0	0	0	0	0	0	-
	- Wheel/truck loader	Unit	0	0	0	0	0	0	-
	- Excavator	Unit	0	0	0	0	0	0	-
	- Truk Tanah	Unit	0	0	0	0	0	0	-
7	IPLT:								
	Hasil pemeriksaan lab (BOD dan COD):								
	- Efluen di Inlet	-	0	0	0	0	0	0	-
	- Efluen di Outlet								

Sumber : Dinas Kebersihan dan Penataan Ruang Tahun 2016

WILAYAH TAGULANDANG







Keterangan :

- Tidak Terproses
- Dikelola Mandiri oleh masyarakat
- Penanganan Sampah terangkut ke TPA

2.3.3. Drainase Perkotaan

Sistem drainase perkotaan terdiri dari berbagai elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Masing-masing institusi seringkali menggunakan berbagai defenisi dan terminologi yang berbeda untuk berbagai elemen dari sistem sungai dan drainase. Dalam bidang pekerjaan umum sendiri, seringkali terminologi ini hanya menyebutkan drainase utama dan minor. Sementara dari pengelola sumber daya air, hampir semua drainase perkotaan diperlakukan sebagai drainase mikro. Terlepas dari berbagai defenisi tersebut, pada dasarnya drainase merupakan prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, baik yang sifatnya primer, sekunder maupun tersier.

Secara umum, sistem drainase perkotaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu lingkungan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (*interceptor drain*), saluran pengumpul (*collector drain*), saluran pembawa (*conveyor drain*), saluran induk (*main drain*), dan badan air penerima (*receiving waters*).

Di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air (*aqueduct*), pelimpah, pintu-pintu air, kolam tando, dan stasiun pompa. Fungsi saluran drainase perkotaan adalah diantaranya yaitu mengeringkan bagian wilayah kota/lingkungan dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif, mengalirkan air permukaan ke badan air penerima terdekat secepatnya, mengendalikan kelebihan air permukaan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.

Berdasarkan fungsi pelayanan, sistem drainase perkotaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Sistem drainase lokal, yang termasuk dalam sistem drainase lokal adalah sistem saluran awal yang melayani suatu kawasan permukiman tertentu seperti kompleks permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industry dan komersial. Sistem ini melayani area kurang dari 10 ha. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang atau instansi lainya.
- b. Sistem drainase utama, yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, dan tersier beserta bangunan kelengkapannya yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Pengelolaan sistem drainase utama merupakan tanggung jawab pemerintah.
- c. Pengendalian banjir (*Flood Control*) adalah sungai yang melintasi wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air sungai, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia.

Secara struktur drainase di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan banyaknya sampah yang menumpuk di saluran mengakibatkan kurang lancarnya sistem pengaliran di dalam saluran tersebut sehingga menimbulkan genangan di beberapa titik.

Tabel 2.13
Lokasi Genangan dan Luas Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Infrastruktur		
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab	Jenis	Ket.
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
1	Kelurahan Tarorane	2	30-40	15 Menit	2	Endapan Material		
2	Kelurahan Akesembeka	2	20-30	10 Menit	2			
3	Kelurahan Tatahadeng	2	15-20	15 Menit	2			
4	Kelurahan Bahu	2	15-20	10 Menit	2			
5	Kelurahan Bahoi	2	20-25	20 Menit	2			
6	Kelurahan Balehumara	3	30-40	10 Menit	2			
7	Desa Pahepa	2	25-30	20 Menit	2			
8	Desa Kapeta	4	20-30	20 Menit	2			
9	Desa Karungo	5	20-30	15 Menit	2	Fungsi Drainase yang tidak baik		

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2016

1. Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2.14.
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kab.Kepl.Siau Tagulandang Biaro

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Panjang	Bentuk Penampang saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
					B (m)	H (m)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
1	Saluran Primer Kawasan	m							
	- Kampung Paniki	m	345,2	U	0,40	0,55	√		
	- Kampung Bahu	m	894	U	0,50	0,70	√		
	- Kampung Mohongsawang	m	220	U	0,35	0,50	√		

- Kampung Lesah	m	220	U	0,40	0,55	√		
- Kampung Lesah Rende	m	66	U	0,40	0,55	√		
- Kampung Mala	m	66	U	0,40	0,60	√		
- Kampung Laghaeng	m	66	U	0,40	0,60	√		
- Kampung Ondong	m	1.697,3	U	0,40	0,55	√		
- Kampung Talawid	m	133	U	0,35	0,50	√		
- Kampung Apengsala	m	579	U	0,40	0,55	√		
- Kampung Tarorane	m	225	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Pahiyama	m	248	U	0,40	0,55	√		
- Kampung Biau	m	469	U	0,40	0,55	√		
- Kampung Bahoi	m	280	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Balehumara	m	683	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Humbia	m	334	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Sawang	m	329	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Hiung	m	150	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Tanaki	m	154	U	0,60	0,80	√		
- Kelurahan Akesimbeka	m	269	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Tulusan	m	154	U	0,60	0,80	√		
- Kelurahan Bebali	m	210,9	U	0,60	0,80	√		
- Kelurahan Paseng	m	115	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Dame	m	115	U	0,60	0,80	√		
- Kelurahan Paseng	m	154	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Lia	m	64	U	0,70	0,90	√		
- Kampung Bandil	m	183	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Makalehi Timur	m	127,5	U	0,40	0,60	√		
- Kampung Pehe	m	210,6	U	0,40	0,60	√		
- Kampung Lai	m	209,3	U	0,40	0,60	√		
- Kampung Wo	m	269,51	U	0,40	0,60	√		
- Kampung Haasi	m	613,16	U	0,40	0,60	√		
- Kota Ulu	m	220,35	U	0,40	0,60	√		

- Kampung Salili	m	47	U	0,40	0,60	√		
- Kampung Deahe	m	127,5	U	0,40	0,60	√		
- Kampung Makalehi	m	230	U	0,35	0,50	√		
- Kampung Lia	m	307,1	U	0,60	0,80	√		
- Kelurahan Tatahadeng	m	154	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Kahetang	m	154	U	0,60	0,80	√		
- Kampung Kisihang	m	164,26	U	0,50	0,70	√		
- Kampung Peling Sawang	m	140,13	U	1,00	1,20	√		
- Kampung Beong	m	118,7	U	0,60	0,70	√		
Bangunan Pelengkap								
- Rumah Pompa	unit	-						-
- Pintu Air	unit	-						-
- Kolam Retensi	unit	-						-
- Trash Rack/ Saringan Sampah	unit	-						-

Sumber : Dinas PU Cipta Karya Tahun 2016

2. Kelembagaan dan Peraturan

Kondisi pengelolaan drainase perkotaan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua daerah permukiman. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Selain dari itu sistem pengelolaan drainase juga melibatkan Kantor Lingkungan Hidup Daerah (KLHD), dimana pencegahan pencemaran air merupakan salah satu prioritas pada jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Sebagai salah satu utilitas suatu daerah/wilayah, drainase tentu saja harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki serta berkesesuaian dengan utilitas lain maupun fungsi lahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), memiliki intervensi yang tidak kecil terutama karena sistem pengelolaan drainase harus dipandang sebagai bagian dari sistem suatu wilayah, baik sarana prasarana fisik maupun aspek non fisik lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase perkotaan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro lebih kepada usaha tiap individu untuk membuat drainase sederhana berupa galian tanah depan rumah masing-masing dan biasanya tidak berfungsi karena tidak semua rumah dalam jalur tersebut membuat drainase sederhana yang serupa. Asumsi yang terbentuk bahwa masalah drainase adalah kewajiban pemerintah membuat sebagian masyarakat tidak peduli dengan sistem drainase perkotaan.

2.4. Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

Risiko sanitasi dapat diartikan terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam penentuan area berisiko sanitasi ditetapkan berdasarkan:

1. Data Sekunder

Penentuan area berisiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area administrasi kelurahan/Desa berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD dan tersedia di sumber data lainnya. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase serta data umum wilayah yang meliputi populasi, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan angka kemiskinan.

2. Penilaian SKPD

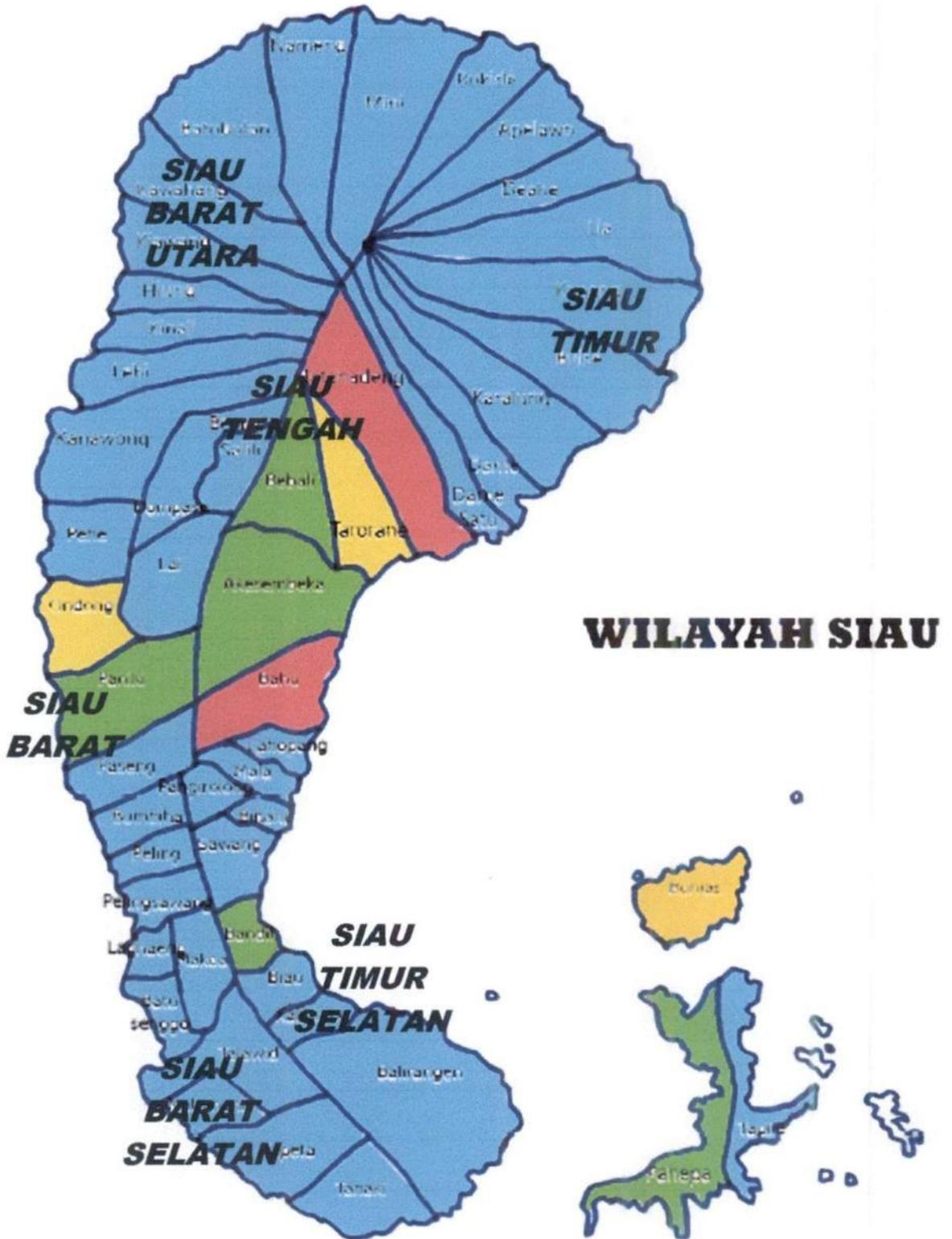
Penentuan area berisiko berdasarkan penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja sanitasi Kab.kepl.Siau Tagulandang Biaro yang mewakili SKPD terkait sanitasi dari Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Penataan Ruang, Kantor Lingkungan Hidup Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

3. Studi EHRA

Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat risiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga, kondisi drainase, perilaku cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, dan buang air besar sembarangan.

Berdasarkan data Sekunder, Penilaian SKPD dan data studi EHRA, diperoleh gambaran area berisiko sanitasi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan.

Gambar 2.8 Peta Area Berisiko Air Limbah Domestik



Keterangan :

- 4. Sangat Tinggi
- 3. Tinggi
- 2. Rendah
- 1. Sangat Rendah